



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DISKRISI REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF  
KASIM RIAU DALAM PEMILIHAN KETUA KELEMBAGAAN  
MAHASISWA MASA BAKTI TAHUN 2019-2020**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Serta Melengkapi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)*



UIN SUSKA RIAU

**OLEH :**

**M. ILHAM ASSAURI**  
**NIM : 11627103873**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**PEKANBARU**

**2020**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN**

Skripsi dengan judul *"Pemilihan Ketua Kelembagaan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Masa Bakti 2019-2020 Ditinjau Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam"* yang ditulis oleh:

Nama : M. Ilham Assauri

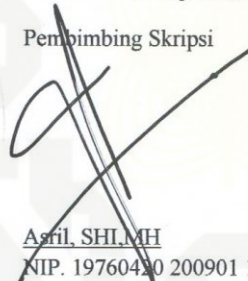
NIM : 11627103873

Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Sya'ban 1441 H  
14 April 2020 M

Pembimbing Skripsi

  
Asril, SHI, MH  
NIP. 19760430 200901 1 008

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**



© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM**

**كلية الشريعة و القانون**

**FACULTY OF SYARIAH AND LAW**

Jl. H. R. Soebrandt No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : DISKRESI REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU DALAM PEMILIHAN KETUA KELEMBAGAAN MAHASISWA MASA BAKTI TAHUN 2019-2020

Nama Panulis : **M. ILHAM ASSAURI**  
NIM : 11627103873  
Program Studi : ILMU HUKUM

Telah dimunaqasyahkan pada :  
Hari / Tanggal : Senin / 4 Mei 2020  
Waktu : 13.00 Wib

Dan telah melakukan perbaikan sesuai dengan Catatan dari Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau



Pekanbaru,  
Tim Penguji

2020

1. Dr. Drs. Heri Sunandar, M.CL  
(Ketua sekaligus Anggota Penguji)
2. Roni Kurniawan, SH., MH  
(Sekretaris sekaligus Anggota Penguji)
3. Dr. Muhammad Darwis, S.HI,MH  
(Anggota Penguji)
4. Peri Pirmansyah, SH, MH  
(Anggota Penguji)

*[Handwritten signatures of the examiners]*

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Drs.H. Hajar, M.Ag.**  
NIP. 19580712 198601 1 005

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Ilham Assauri  
 NIM : 11627103873  
 Tempat/Tanggal Lahir : Tembilahan, 20 Desember 1996  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Fakultas : Syariah dan Hukum  
 Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“DISKRESI REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU DALAM PEMILIHAN KETUA KELEMBAGAAN MAHASISWA MASA BAKTI TAHUN 2019-2020”** adalah benar hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri, duplikat, plagiat, dan/atau dibuat oleh orang lain baik secara keseluruhan atau sebagian besar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 10 Juni 2020

Yang Membuat Pernyataan



*[Signature]*

**M. ILHAM ASSAURI**  
 NIM. 11627103873

UIN SUSKA RIAU



## ABSTARAK

Penelitian ini berjudul “Diskresi Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Dalam Pemilihan Ketua Kelembagaan Mahasiswa Masa Bakti Tahun 2019-2020.”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dasar hukum diskresi Rektor dalam pemilihan ketua kelembagaan SEMA dan DEMA Universitas serta Fakultas di lingkungan UIN Suska Riau masa bakti tahun 2019-2020 ditinjau berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, bagaimana pelaksanaan pemilihan ketua kelembagaan SEMA dan DEMA Universitas serta Fakultas di lingkungan UIN Suska Riau masa bakti tahun 2019-2020, dan bagaimana pelaksanaan pemilihan ketua kelembagaan mahasiswa apabila terjadi *vacum of power* SEMA dan DEMA Universitas serta Fakultas di lingkungan UIN Suska Riau.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis yaitu penulis secara langsung turun lapangan untuk melakukan observasi dan wawancara mencari data yang diperlukan. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, yaitu bermaksud untuk memberikan gambaran tentang permasalahan pokok penelitian. Lokasi penelitian ini berada di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan: 1) Bahwa dasar hukum diskresi Rektor dalam pemilihan ketua kelembagaan SEMA dan DEMA Universitas serta Fakultas di lingkungan UIN Suska Riau masa bakti tahun 2019-2020 karena terjadi *vacum of power* atau kekosongan kekuasaan SEMA dan DEMA UIN SUSKA Riau masa bakti tahun 2019-2020 sejak 28 Februari 2019. Rektor diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan sebagai pejabat tata usaha negara untuk mengelola organisasi kemahasiswaan sebagaimana tertuang didalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pasal 26 Ayat (1) menyebutkan tugas dan kewajiban Rektor UIN Suska Riau dalam mengelola perguruan tinggi. 2) Bahwa pelaksanaan pemilihan ketua SEMA dan DEMA Universitas serta Fakultas di lingkungan UIN Suska Riau masa bakti tahun 2019-2020 yang dilaksanakan secara serentak oleh Tim *Ad Hoc* dan Tim *Fit and Proper Test* tidak terlaksana dengan baik sebagaimana dengan peraturan yang telah ditetapkan, karena pemilihan tidak diikuti oleh seluruh Fakultas di lingkungan UIN Suska Riau, sehingga untuk beberapa Fakultas dikembalikan kepada Dekan menunjuk calon ketua SEMA dan DEMA Fakultas untuk diberikan kepada Tim *Ad Hoc* dan Tim *Fit and Proper Test*. 3) Bahwa pelaksanaan pemilihan ketua kelembagaan mahasiswa apabila terjadi *vacum of power* SEMA dan DEMA Universitas serta Fakultas di lingkungan UIN Suska Riau, Rektor dapat membentuk kembali Tim *Ad Hoc* dan Tim *Fit and Proper Test* dengan mempertimbangan peristiwa yang terjadi pada pemilihan ketua kelembagaan SEMA dan DEMA Universitas serta Fakultas di lingkungan UIN Suska Riau masa bakti tahun 2019-2020, serta dengan mempertimbangkan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb*

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang di ridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda Rusli, Ibunda Aini, Kakak Rabiyyatun Adawiyah dan Adik Muhajir Hilal yang telah memberikan motivasi dorongan semangat dan membantu selama perkuliahan hingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi ini, terimakasih Ayah dan Ibu atas doa, restu dan ridho nya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin M.Ag Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Bapak Firdaus SH.MH dan Sekretaris Jurusan Bapak Muslim S.Ag, SH., M.Hum serta staf jurusan Ilmu Hukum yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Asril, SHI.,MH sebagai pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan kepada penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Maghfirah, M.A selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan.
7. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis dimasa mendatang.
8. Kepada Forum Kajian Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum (FK-MASSYA), Lembaga Kajian Hukum Indonesia (LKHI) UIN Suska Riau, Pengurus Senat Mahasiswa (SEMA) Fakultas Syariah dan Hukum Masa Bakti 2018-2019, Forum Lembaga Dakwah Fakultas Hukum Seluruh Indonesia (FORDAFHI). Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Komisariat UIN Suska Riau yang telah memberikan pengalaman berharga dalam berorganisasi dan kepemimpinan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Kepada Endrianto, SH sebagai abang yang telah membimbing penulis dari awal masuk di UIN Suska Riau hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada Ahmad Irfan yang telah bersama penulis membangun Teras Nasi Kuning selama perkuliahan dengan penuh semangat pantang menyerah membangun dan merintis usaha.
11. Kepada Sri Opitasari yang telah menemani dan membantu penulis selama perkuliahan di UIN Suska Riau hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada seluruh kawan-kawan ilmu hukum angkatan 2016 yang telah berjuang bersama-sama belajar menjadi orang yang berguna dan bermanfaat keluarga, bangsa dan negara.
13. Kepada Badan Pertanahan Nasional kota Pekanbaru dan seluruh staf jajarannya yang telah menerima penulis untuk Peaktek Kerja Lapangan serta memberikan bimbingan dan pengalaman kerja kepada penulis.
14. Kepada seluruh kawan-kawan Kuliah Kerja Nyata UIN Suska Riau Tahun 2019 Desa Petai Baru, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi. Yaitu Rivaldo Difa Putra, M. Ihsanurrahman, Dores Afrilia, Aulia Rahma Jumardi, Rita Arlina, Chania Wulandari, Irma Sesti, Rena Agustina dan Nurma Yunita yang telah bersama-sama melaksanakan pengabdian masyarakat untuk membangun bangsa.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15. Kepada seluruh kelembagaan organisasi kemahasiswaan dan mahasiswa UIN Suska Riau yang telah membantu dan bersedia sebagai narasumber hingga penulis menyelesaikan skripsi ini.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekanbaru, 31 Maret 2020

Penulis

**M. ILHAM ASSAURI**  
**NIM. 11627103873**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah.....	13
C. Rumusan Masalah .....	14
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	15
E. Metodologi Penelitian .....	16
F. Sistematika Penulisan.....	22
 <b>BABII GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.....	25
1. Sejarah singkat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau .....	25
2. Visi, Misi, Karakteristik dan Tujuan .....	31
3. Struktur Organisasi .....	33
B. Organisasi Mahasiswa .....	35
1. Pengertian Organisasi Mahasiswa .....	35
2. Tujuan Organisasi Kemahasiswaan.....	38
3. Dasar Hukum Organisasi Kemahasiswaan .....	39
4. Organisasi Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau .....	40



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Wewenang .....	44
1. Pengertian Wewenang .....	44
2. Sumber dan Cara Memperoleh Wewenang Pemerintahan..	46
B. Teori Diskresi.....	50
1. Pengertian Diskresi .....	50
2. Sumber Hukum dan Asas Diskresi .....	52
C. Rektor .....	58
1. Pengertian Rektor .....	58
2. Tugas dan Kewajiban Rektor .....	59

### BAB IV PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Diskresi Rektor Dalam Pemilihan Ketua Kelembagaan Senat Mahasiswa dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Serta Fakultas di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Masa Bakti Tahun 2019-2020 Ditinjau Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.....	62
B. Pelaksanaan Pemilihan Ketua Kelembagaan Senat Mahasiswa dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Serta Fakultas di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Masa BaktiTahun 2019-2020.....	76
C. Pelaksanaan Pemilihan Ketua Kelembagaan Mahasiswa Apabila Terjadi <i>Vacum Of Power</i> Senat Mahasiswa dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Serta Fakultas di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau .....	88





## BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	99
B. Saran .....	100

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Populasi Sampel.....	21
Tabel II.1	Pimpinan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Periode 1970 – 2022.....	30
Tabel IV.1	Panitia Pemilihan Senat Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Masa Bakti Tahun 2019.....	65
Tabel IV.2	Pembentukan Tim <i>Ad Hoc</i> Pemilihan Senat Mahasiswa dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Serta Fakultas di Lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2019.....	67
Tabel IV.3	Pembentukan Tim <i>Fit and Proper Test</i> Pemilihan Senat Mahasiswa dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas serta Fakultas di Lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2019.....	68
Tabel IV.4	<i>Time Schedule</i> dan Tahapan Pemilihan Ketua SEMA dan DEMA Universitas Serta Fakultas di Lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau Masa Bakti Tahun 2019- 2020.....	82
Tabel IV.5	Hasil Pemilihan Ketua Senat Mahasiswa dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Serta Fakultas di Lingkungan UIN Suska Riau Masa Bakti Tahun 2019- 2020.....	84



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sejak awal kemerdekaan para pendiri negeri ini telah memiliki komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas pendidikan bangsa. Dalam pembukaan UU 1945 disebutkan bahwa salah satu tujuan dibentuknya pemerintah negara Indonesia adalah untuk “memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.” Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah merumuskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah “mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”<sup>1</sup>

Universitas adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan keilmuan dan profesional dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Pada perguruan tinggi yang berbentuk universitas terdiri dari berbagai fakultas, dan di tiap fakultas dapat terdiri dari beberapa jurusan. Sedang

---

<sup>1</sup> Sulistyowati Irianto, *Otonomi Perguruan Tinggi Suatu Keniscayaan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), h.44-45.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada masing-masing jurusan pun masih dimungkinkan terdiri dari beberapa program studi.<sup>2</sup>

Dengan begitu kampus merupakan komunitas atau masyarakat yang tersendiri yang disebut masyarakat akademik (sivitas akademika). Di kampus terdapat kegiatan-kegiatan dan tata aturan. Sehingga kampus memiliki suasana khas yaitu suasana akademik (*academic atmosphere*).<sup>3</sup> Masyarakat akademis merupakan kategori masyarakat yang warganya memiliki sifat-sifat ingin tahu segala fenomena yang ada, dengan melakukan kegiatan secara ilmiah, agar diperoleh kebenaran yang teruji sesuai dengan metode ilmu pengetahuan.<sup>4</sup>

Mahasiswa sebagai salah satu elemen kampus baik secara individu maupun kelompok dalam organisasi kemahasiswaan, memiliki dimensi yang luas. Di samping sebagai bagian civitas akademika (dimensi keilmuan) mereka juga sebagai bagian dari komunitas pemuda (dimensi sosial) yang memiliki tugas dan tantangan masa depan. Dengan kesadaran akan kewajiban dan haknya maka mahasiswa akan dapat mengembangkan potensinya dalam segala dimensi yang melekat padanya.

Organisasi kemahasiswaan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) sebagai salahsatu wahana pengembangan kepribadian dan peningkatan wawasan dan intelektual, merupakan salah satu bagian dari keseluruhan sistem akademis

<sup>2</sup> A. Malik Fadjar dan Muhdjir Effendy, *Dunia Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 1998), Cet. ke-2, h. 2-3.

<sup>3</sup> *Ibid*, h.5.

<sup>4</sup> Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, Huruf A.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di PTKI. Kontribusinya ditujukan untuk membina dan mengembangkan kepribadian dalam rangka mencapai fungsi dan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa yang bermartabat, dan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang bertakwa, berilmu, dan beramal. Jadi, organisasi mahasiswa intra kampus pada dasarnya merupakan wahana untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan penalaran, serta menyalurkan minat dan kegemaran.<sup>5</sup>

Organisasi merupakan pengelompokkan orang-orang kedalam aktivitas kerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.<sup>6</sup> Keberadaan organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi merupakan hal penting dalam rangka mengembangkan bakat, minat dan potensi mahasiswa. Hal tersebut dipertegas dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi di dalam Pasal 77 mengenai Organisasi Kemahasiswaan. Pernyataan tersebut memperjelas bahwa organisasi mahasiswa berfungsi untuk melatih mahasiswa agar siap terjun ke masyarakat. Dalam organisasi kemahasiswaan, mahasiswa dituntut untuk berani mengemukakan pendapat, berani mengambil keputusan dengan cepat, memiliki kekuatan tanggung jawab, dan menumbuhkan keterampilan kewarganegaraan. Selain itu, organisasi mahasiswa mempunyai peran yang strategis untuk mewujudkan

<sup>5</sup> Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, Huruf A.

<sup>6</sup> Abdul Aziz Wahab, *Anatomi Organisasi dan Kepemimpinan Pendidikan*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2011), h. 106.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

idealisme mahasiswa dan menjadi tempat mengembangkan potensi, baik akademis maupun organisasi. Sebagai mahasiswa yang progresif, kreatif, dan kritis harus mampu mengambil peran tersebut.<sup>7</sup>

Menurut Udai Pareek suatu organisasi mempunyai titik singgung dengan lingkungan sosialnya, yaitu keadaan politis, ekonomis dan kebudayaan yang terdapat pada suatu waktu tertentu dalam masyarakat itu. Proses utama dalam dimensi ini adalah pengaruh siapa yang lebih mempengaruhi, organisasi mempengaruhi lingkungan, atau lingkungan yang mempengaruhi organisasi. Ini merupakan proses penting untuk pembangunan lembaga. Proses pengaruh juga menyangkut otonomi organisasi; sejauh mana organisasi mampu membentengi diri terhadap pengaruh yang tidak semestinya dari luar, di samping membuka terhadap pengaruh yang sehat.<sup>8</sup>

Pada tahun 2019 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau atau disingkat UIN Suska Riau mulai menerapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sebagai aturan hukum yang mengatur organisasi kemahasiswaan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Dimasa transisi pelaksanaan peraturan tersebut di UIN Suska Riau

<sup>7</sup> Kosasih, "Peranan Organisasi Kemahasiswaan Dalam Pengembangan Civic Skills Mahasiswa". Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Vol 25, No 2, 2016, h.65. <https://ejournal.upi.edu/index.php/jpis/article/view/6196>, Diakses Pada Sabtu 26 Oktober 2019.

<sup>8</sup> Yusuf Hadijaya, *Organisai Kemahasiswaan dan Kompetensi Manajerial Mahasiswa*, (Medan: Perdana Pulishing, 2015), h.16.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menuai pro dan kontra dikalangan mahasiswa, karena adanya perubahan garis intruktif dan koordinatif organisasi kemahasiswaan, perubahan nama lembaga organisasi kemahasiswaan dan perubahan sistem pemilihan ketua kelembagaan organisasi kemahasiswaan. Sebelumnya pemilihan ketua Badan Legislatif Mahasiswa (BLM) yang sekarang berubah menjadi Senat Mahasiswa (SEMA) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang sekarang berubah menjadi Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) dilaksanakan melalui Pemilihan Raya Mahasiswa (PEMIRA) atau pemilihan langsung telah berganti menggunakan sistem perwakilan atau musyawarah besar mahasiswa. sehingga mahasiswa UIN Suska Riau tidak dapat memilih langsung calon ketua yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan.

Jika melihat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, menjelaskan bahwa pemilihan ketua kelembagaan Senat Mahasiswa (SEMA), Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Universitas dan Fakultas, Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan Unit Kegiatan Khusus (UKK) ketua kelembagaan dipilih oleh mahasiswa sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, dengan tegas Huruf I menjelaskan syarat dan tata cara pemilihan Senat Mahasiswa (SEMA) serta Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) meliputi:<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, Huruf I.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Senat Mahasiswa (SEMA)

a. Syarat-syarat Calon Pengurus/Perwakilan

- 1) Berstatus sebagai mahasiswa aktif.
- 2) Memiliki IPK minimal 3,25.
- 3) Duduk pada semester V – VII.
- 4) Mampu membaca al-Qur'an.
- 5) Pernah menjadi pengurus Ormawa intra kampus yang dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK).
- 6) Sehat jasmani dan rohani.
- 7) Bersedia dicalonkan dan/atau mencalonkan diri secara tertulis.
- 8) Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk tidak menjadi pengurus pada organisasi ekstra kampus atau partai politik selama menjabat.
- 9) Tidak pernah melanggar tata tertib dan kode etik mahasiswa.
- 10) Memiliki visi, misi, dan program yang jelas.
- 11) Mendapatkan rekomendasi tertulis dari Wakil Rektor/Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan untuk tingkat universitas/institut/sekolah tinggi.

b. Anggota Senat Mahasiswa

- 1) Anggota Senat Mahasiswa Universitas/Institut berasal dari utusan Fakultas.
- 2) Anggota Senat Mahasiswa Fakultas berasal dari utusan HMJ.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Anggota Senat Mahasiswa Sekolah Tinggi berasal dari utusan HM-PS.

4) Pemilihan anggota Senat Mahasiswa dilaksanakan melalui perwakilan dengan proporsi: 1 Jurusan/Prodi 1 wakil.

#### c. Tata Cara Pemilihan Ketua Senat Mahasiswa

1) Ketua Senat Mahasiswa dipilih dari dan oleh anggota SEMA.

2) Pemilihan Ketua SEMA berdasarkan musyawarah mufakat atau pemungutan suara.

3) Ketua terpilih menyusun komposisi pengurus SEMA.

4) Pengurus SEMA ditetapkan oleh Rektor/Ketua/Dekan.

#### 2. Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA)

##### a. Syarat-Syarat Calon Ketua

1) Berstatus sebagai mahasiswa aktif.

2) Memiliki IPK minimal 3,25.

3) Duduk pada semester V – VII.

4) Mampu membaca al-Qur'an.

5) Pernah menjadi pengurus Ormawa intra kampus yang dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK).

6) Sehat jasmani dan rohani.

7) Bersedia dicalonkan dan/atau mencalonkan diri secara tertulis.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 8) Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk tidak menjadi pengurus pada organisasi ekstra kampus atau partai politik selama menjabat.
- 9) Tidak pernah melanggar tata tertib dan kode etik mahasiswa.
- 10) Memiliki visi, misi, dan program yang jelas.
- 11) Mendapatkan rekomendasi tertulis dari Wakil Rektor/Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan untuk tingkat universitas/institut/sekolah tinggi.

#### b. Tata Cara Pemilihan Ketua DEMA

- 1) Senat Mahasiswa membentuk panitia pemilihan berdasarkan tata tertib pemilihan dan diusulkan ke pimpinan PTKI untuk ditetapkan.
- 2) Tata tertib pencalonan ketua DEMA diatur oleh Senat Mahasiswa tingkat perguruan tinggi.
- 3) Komposisi panitia terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota.
- 4) Tugas panitia melaksanakan penjangkaran bakal calon, penetapan calon, dan pelaksanaan pemilihan ketua DEMA.
- 5) Unsur panitia terdiri atas perwakilan lembaga-lembaga kemahasiswaan.
- 6) Kriteria panitia:
  - a) Berstatus sebagai mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan menunjukkan slip pembayaran SPP.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Pernah menjadi pengurus lembaga intra kampus.
  - c) Bersedia menjadi panitia yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis.
  - d) Tidak diperkenankan mencalonkan diri sebagai kandidat/calon ketua DEMA.
  - e) Minimal menduduki semester IV dan maksimal semester VII.
- 7) Panitia menyampaikan hasil pemilihan kepada Senat Mahasiswa untuk diteruskan kepada pimpinan PTKI dengan melampirkan berita acara pemilihan.
- 8) Penyampaian hasil pemilihan dilakukan paling lambat 7 hari setelah pemilihan.
- 9) Pimpinan PT menetapkan dan melantik pengurus DEMA terpilih.
- 10) Pemilihan Ketua DEMA dilaksanakan dengan menggunakan sistem perwakilan. Yang dimaksud dengan sistem perwakilan ialah:
  - a) Bahwa Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa dipilih oleh wakil dari Jurusan atau Program Studi.
  - b) Wakil dari masing-masing Jurusan atau Program Studi diutus oleh HMJ atau HM-PS.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Halal Cipta UIN Suska Riau

Keberadaan organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi merupakan hal penting dalam rangka mengembangkan bakat, minat dan potensi mahasiswa diri mahasiswa terutama dalam hal kepemimpinan. Sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi Pasal 111 yang menyatakan bahwa:<sup>10</sup>

- a) Untuk melaksanakan peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat, kegemaran dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan pada perguruan tinggi dibentuk organisasi kemahasiswaan.
- b) Organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi diselenggarakan dari, oleh dan untuk mahasiswa.

Karena berlarut mendapat penolakan dari mahasiswa UIN Suska Riau terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan tidak adanya laporan kepengurusan baru oleh BLM dan BEMUIN Suska Riau masa bakti tahun 2018-2019 kepada Rektor. Sehingga terjadi *vacuum of power* BEM UIN Suska Riau sejak 28 Februari 2019.<sup>11</sup> Karena terjadi *vacuum of power* atau kekosongan kekuasaan kelembagaan SEMA dan

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Perguruan Tinggi, Pasal 111 Butir (a) dan (b).

<sup>11</sup> RiauPos.Co 2019, *Temui Mahasiswa: Rektor UIN Suska Riau Prof Dr Ahmad Mujahidin Menjumpai Mahasiswa yang menggelar Aksi Demonstrasi Didepan Gedung Rektorat UIN Suska Riau*, <http://m.riaupos.co/202711-berita-akhirnya-rektor-uin-suska-temui-mahasiswa.html>, Diakses Pada Sabtu 26 Oktober 2019.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DEMA UIN Suska Riau, Rektor mengeluarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor 1321/R/2019 tentang Pengembalian Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Periode Tahun 2018-2019 kepada Rektor.

Dengan telah dikembalikannya pengurus BEM UIN Suska Riau Periode Tahun 2018-2019, kemudian Rektor mengeluarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor 1074/R/2019 tentang Pembentukan Tim *Ad Hoc* Serta Tim *Fit and Proper Test* Pemilihan Senat Mahasiswa dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Serta Fakultas di Lingkungan UIN Suska Riau Tahun 2019. Dengan demikian berdasarkan surat keputusan Rektor tersebut, pelaksanaan pemilihan calon ketua SEMA dan DEMA dilaksanakan oleh Tim *Ad Hoc* dan Tim *Fit and Proper Test* secara serentak baik pada tingkat Universitas serta Fakultas di lingkungan UIN Suska Riau masa bakti tahun 2019-2020.

Namun dalam pembentukan Tim *Ad Hoc* dan Tim *Fit and Proper Test* Rektor tidak melibatkan mahasiswa pada pelaksanaan pemilihan ketua SEMA dan DEMA Universitas serta Fakultas di lingkungan UIN Suska Riau masa bakti tahun 2019-2020. Sehingga Adapun dasar Rektor membentuk Tim *Ad Hoc* dan Tim *Fit and Proper Test* adalah sebagai berikut:

- 1) Terjadinya kevakuman kepengurusan Senat Mahasiswa Universitas dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas sejak 28 Februari 2019;
- 2) Kepengurusan Senat Mahasiswa Universitas dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas telah dikembalikan ke Rektor berdasarkan Surat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor 1321/R/2019 tanggal 17 Mei 2019 tentang Pengembalian Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Periode 2018-2019.

- 3) Terjadinya status awas radikalisi pada UIN Suska Riau berdasarkan Hasil Penelitian Direktorat PTKI Kementerian Agama RI bekerjasama dengan Lembaga Kajian dan Pengembangan SDM (LAKPESDAM) Pengurus Besar Nahdatul Ulama Tahun 2019 tentang Pemetaan Tingkat Moderasi Beragama dan Pengembangannya di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).<sup>12</sup>
- 4) Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Huruf L, *“Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur oleh PTKI masing-masing.”*<sup>13</sup>

Aturan atau peraturan tersebut secara sederhana kita pahami sebagai kebijakan publik, jadi kebijakan publik ini dapat kita artikan suatu hukum. Akan tetapi tidak hanya sekedar hukum namun kita harus memahaminya secara utuh dan benar. Ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan bersama dipandang perlu untuk diatur maka formulasi isu tersebut ditetapkan menjadi kebijakan

<sup>12</sup> Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor 1074/R/2019 Tentang Pembentukan Tim *Ad Hoc* Serta Tim *Fit and Proper Test* Pemilihan Senat Mahasiswa dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Serta Fakultas di Lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2019, h.1.

<sup>13</sup> Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, Huruf L.



publik yang harus dilakukan dan disusun serta disepakati oleh para pejabat yang berwenang.<sup>14</sup>

Berangkat dari hal tersebut di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul **“Diskresi Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Dalam Pemilihan Ketua Kelembagaan Mahasiswa Masa Bakti Tahun 2019-2020.”**

## B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas maka penulis membatasi penelitian ini pada dasar hukum diskresi Rektor dalam pemilihan ketua kelembagaan Senat Mahasiswa dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas serta Fakultas di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau masa bakti tahun 2019-2020 ditinjau berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, pelaksanaan pemilihan ketua kelembagaan Senat Mahasiswa dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas serta Fakultas di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau masa bakti tahun 2019-2020, dan pelaksanaan pemilihan ketua kelembagaan mahasiswa apabila terjadi *vacum of power* Senat Mahasiswa dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas serta Fakultas di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

<sup>14</sup> Taufiqurahman, *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*, (Jakarta: Universitas Moestopo Beragama (Pers), 2014), h.7.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### C. Rumusan Masalah

Dari penelitian di atas adapun rumusan permasalahan dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar hukum diskresi Rektor dalam pemilihan ketua kelembagaan Senat Mahasiswa dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas serta Fakultas di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau masa bakti tahun 2019-2020 ditinjau berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam ?
2. Bagaimana pelaksanaan pemilihan ketua kelembagaan Senat Mahasiswa dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas serta Fakultas di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau masa bakti tahun 2019-2020?
3. Bagaimana pelaksanaan pemilihan ketua kelembagaan mahasiswa apabila terjadi *vacum of power* Senat Mahasiswa dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas serta Fakultas di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dasar hukum diskresi Rektor dalam pemilihan ketua kelembagaan Senat Mahasiswa dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas serta Fakultas di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau masa bakti tahun 2019-2020 ditinjau berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan pemilihan ketua kelembagaan Senat Mahasiswa dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas serta Fakultas di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau masa bakti tahun 2019-2020.
- c. Untuk mengetahui pelaksanaan pemilihan ketua kelembagaan mahasiswa apabila terjadi *vacum of power* Senat Mahasiswa dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas serta Fakultas di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

### Manfaat penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian yang hendak diraih adalah sebagai berikut :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**a. Kegunaan Ilmiah**

- 1) Penelitian ini diharapkan menjadi sebuah referensi dalam mengambil kebijakan dan/atau tindakan yang berhubungan dengan masalah dalam pemilihan ketua kelembagaan mahasiswa khususnya di UIN Suska Riau.
- 2) Penelitian ini diharapkan menjadi sebuah referensi bagi peneliti lainnya yang juga tertarik melakukan penelitian pada objek penelitian yang terkait.

**b. Kegunaan Praktis**

- 1) Memberikan informasi bagi mahasiswa untuk mengetahui haknya sebagai sivitas akademika dalam pemilihan ketua kelembagaan Senat Mahasiswa dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas serta Fakultas di lingkungan UIN Suska Riau.
- 2) Memberikan informasi dan sebagai referensi terhadap pemilihan ketua kelembagaan organisasi kemahasiswa khususnya di UIN Suska Riau yang akan datang.

**E. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian dalam penulisan menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dalam metode penelitian ini guna memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 1. Jenis Penelitian

Jika dilihat dari sudut jenis penelitian, maka penelitian ini masuk kedalam penelitian hukum sosiologis.<sup>15</sup> Penulis secara langsung turun lapangan untuk melakukan observasi mencari data yang diperlukan.

#### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara cermat karakteristik dari fakta-fakta (individu, kelompok atau keadaan) dan untuk menentukan secara jelas tentang permasalahan pokok penelitian.<sup>16</sup>

#### 3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan penulis lakukan dalam penelitian ini terletak di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau disingkat UIN Suska Riau.

#### 4. Sumber Data

Pada penelitian ini jika dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder :

- a. Sumber primer adalah sumber data yang langsung dari sumbernya, baik melalui observasi, wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), Cet ke-12, h.14.

<sup>16</sup> Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2000), h.58.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Sumber sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder dibagi menjadi:<sup>17</sup>

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data ini adalah sebagai berikut :

- a. Observasi, merupakan menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya. Instrumen yang dipakai dapat berupa lembar pengamatan, panduan pengamatan, dan lainnya.

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), Ed.1 Cet. ke-6. h.106.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Wawancara, merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain. Instrumen dapat berupa pedoman wawancara maupun *checklist*.<sup>18</sup>, Adapun yang akan diwawancara dalam penelitian ini adalah Rektor UIN Suska Riau, Wakil Rektor III Bagian Kemahasiswaan dan Alumni UIN Suska Riau, ketua SEMA dan DEMA di lingkungan UIN Suska Riau masa bakti tahun 2018-2019 dan ketua SEMA dan DEMA di lingkungan UIN Suska Riau masa bakti tahun 2019-2020.
- c. Dokumen, merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>19</sup>
- d. Tinjauan Pustaka, merupakan peneliti mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitiannya sehingga penelitian yang

<sup>18</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), Ed.2, h. 51.

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2014).  
h.326.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat “*trial and error*.”

Adapun studi kepustakaan dibedakan menjadi dua macam, yaitu:<sup>20</sup>

- 1) Acuan umum, yang berisi konsep-konsep, teori-teori, dan informasi-informasi lain yang bersifat umum, misalnya: buku-buku, indeks, ensiklopedia, farmakope dan sebagainya;
- 2) Acuan khusus, yang berisi hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diteliti, misalnya: jurnal, laporan penelitian, buletin, tesis, disertasi, brosur dan sebagainya.

#### 6. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah keseluruhan (*universum*) dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya, sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian.<sup>21</sup>

Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang mewakili keseluruhan subjek penelitian yang akan mempermudah penelitian. Sedangkan untuk sampel penulis menggunakan teknik *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah pemilihan sampel berdasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai hubungan dengan

<sup>20</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Ed. 1, h. 112-113.

<sup>21</sup> Burhan Bugin, *Op.Cit*, h. 109.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya.<sup>22</sup> Adapun populasi dan sampel penulis telah menetapkan seseorang atau sesuatu tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penulis dapat dilihat pada tabel I.1 sebagai berikut:

**Tabel I.1**  
**Populasi dan Sampel**

No	Nama Populasi	Populasi	Sampel
1	Rektor UIN Suska Riau	1	1
2	Wakil Rektor III UIN Suska Riau Bagian Kemahasiswaan dan Alumni	1	1
3	Ketua Senat Mahasiswa Universitas dan Fakultas di lingkungan UIN Suska Riau masa bakti tahun 2018-2019	9	4
4	Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas dan Fakultas di lingkungan UIN Suska Riau masa bakti tahun 2018-2019	9	4
5	Ketua Senat Mahasiswa Universitas dan Fakultas di lingkungan UIN Suska Riau masa bakti tahun 2019-2020	9	4
6	Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas dan Fakultas di lingkungan UIN Suska Riau masa bakti tahun 2019-2020	9	4
<b>Jumlah</b>		<b>38</b>	<b>18</b>

<sup>22</sup> Husein Umar, *Op. Cit*, h. 92.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu upaya pengumpulan data, mengorganisasikan data, memilah data, mengolahnya sehingga mendapatkan kesimpulan dari data tersebut apabila data tersebut tidak berupa angka, dan metode pengumpulan data tersebut menggunakan wawancara dan pengamatan.<sup>23</sup>

**F. Sistematika Penulisan**

Penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

Dalam BAB ini penulis memaparkan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Dalam BAB ini berisikan tentang Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau meliputi: (sejarah singkat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, visi, misi, karakteristik dan tujuan, struktur organisasi), dan Organisasi kemahasiswaan meliputi: (pengertian organisasi kemahasiswaan, tujuan organisasi kemahasiswaan, dasar hukum organisasi

<sup>23</sup> Bambang Waluyo, *Op.Cit.* h.77.

### BAB III

kemahasiswaan, dan organisasi kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

### TINJAUAN PUSTAKA

Dalam BAB ini berisikan tentang teori wewenang meliputi: (pengertian wewenangan, sumber dan cara memperoleh wewenangan pemerintahan), teori diskresi meliputi: (pengertian diskresi, dasar hukum dan asas diskresi), dan Rektor meliputi: (pengertian Rektor, tugas dan kewajiban Rektor).

### BAB IV

### PEMBAHASAN

Dalam BAB ini akan dibahas tentang hasil dari penelitian dan pembahasan meliputi dasar hukum diskresi Rektor dalam pemilihan ketua kelembagaan Senat Mahasiswa dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas serta Fakultas di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau masa bakti tahun 2019-2020 ditinjau berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, pelaksanaan pemilihan ketua kelembagaan Senat Mahasiswa dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas serta Fakultas di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau masa bakti tahun 2019-2020, dan pelaksanaan pemilihan ketua kelembagaan mahasiswa apabila terjadi *vacum of power* Senat Mahasiswa

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas serta Fakultas di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**BAB V****PENUTUP**

Dalam BAB ini penulis memberikan kesimpulan dan saran-saran rekomendasi dari hasil penelitian.

**DAFTAR PUTAKA****LAMPIRAN**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

##### 1. Sejarah Singkat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

UIN Sultan Syarif Kasim Riau merupakan hasil pengembangan/peningkatan status pendidikan dari institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru yang secara resmi dikukuhkan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2005 tanggal 4 Januari 2005 tentang perubahan IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru menjadi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dan diresmikan pada 9 Februari 2005 oleh Presiden RI, Bapak Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono sebagai tindak lanjut perubahan status ini, Menteri Agama RI menetapkan Organisasi dan Tata kerja UIN Suska Riau berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2005 tanggal 4 Februari 2005.<sup>24</sup>

Institut Agama Islam Negeri Sulthan Syarif Qasim (IAIN Susqa) Pekanbaru sebagai cikal bakal UIN Suska Riau, didirikan pada tanggal 19 september 1970 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor. 194 Tahun 1970. Institut ini diresmikan berdirinya oleh Menteri Agama Republik Indonesia K.H. Ahmad Dahlan pada tanggal 19 september 1970 berupa penandatanganan piagam dan pelantikan Rektor yang pertama, Prof. H. Ilyas Muhammad Ali. IAIN Susqa ini pada

<sup>24</sup> Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor 00699/R/2016 Tentang Panduan Dan Informasi Akademik T.A 2016/2017 UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru: 2016, h.1.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mulanya berasal dari beberapa Fakultas dari Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta yang kemudian dinegerikan, yaitu Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Riau di Pekanbaru, Fakultas Syariah Universitas Islam Riau di Tembilahan, dan Fakultas Ushuluddin Mesjid Agung An-Nur Pekanbaru.

Dengan persetujuan Pemerintah Daerah, maka institut Agama Islam Negeri Pekanbaru ini diberi nama dengan Sulthan Syarif Qasim, yaitu nama Sulthan Kerajaan Siak Sri Indrapura ke-12 atau terakhir, yang juga nama pejuang nasional asal Riau. Pengambilan nama ini mengingat jasa-jasa dan pengabdian beliau terhadap negeri, termasuk dibidang pendidikan.

IAIN Susqa Pekanbaru ini mengambil tempat kuliah pada mulanya di bekas sekolah Cina di Jl. Cempaka, sekarang bernama Jl. Teratai, kemudian dipindahkan ke mesjid Agung An-Nur. Lalu pada tahun 1973, barulah IAIN Susqa menempati kampus Jl. Pelajar (Jl. K.H. Ahmad Dahlan sekarang). Bangunan pertama seluas 840 m<sup>2</sup> yang terletak di atas tanah berukuran 3,65 Ha dibiayai sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah dan diresmikan penggunaannya oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau, Arifin Achmad, pada tanggal 19 juni 1973.<sup>25</sup>

Ketika didirikan, IAIN Susqa hanya terdiri atas tiga Fakultas, yaitu Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syari'ah, dan Fakultas Ushuluddin. Namun sejak tahun 1998, IAIN Susqa mengembangkan diri dengan membuka

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fakultas Dakwah. Fakultas ini didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 104 Tahun 1998 tanggal 24 Februari 1998. Fakultas ini pada mulanya berasal dari jurusan Dakwah yang ada pada Fakultas Ushuluddin. Pada tahun 1997 telah berdiri pula Program Pascasarjana/PPs IAIN Susqa Pekanbaru.

Keinginan untuk memperluas bidang kajian di IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru muncul melalui Seminar Cendikiawan Muslim (1985), Seminar Budaya kerja dalam Perspektif Islam (1987), dan dialog ulama serta cendikiawan se-Provinsi Riau. Tiga tahun berturut-turut (1996, 1997, 1998) melahirkan rekomendasi: agar IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru membuka program studi baru (umum). Melalui keputusan rapat senat IAIN Susqa tanggal 9 September 1998 yang menetapkan perubahan status IAIN Susqa menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, maka dilakukan persiapan secara bertahap. Mulai pada tahun akademik 1998/1999 telah dibuka beberapa program studi umum pada beberapa fakultas, seperti program studi Psikologi pada Fakultas Tarbiyah, program studi Manajemen dan Manajemen Perusahaan pada Fakultas Syari'ah, dan program studi Ilmu Komunikasi pada Fakultas Dakwah. Pada tahun akademik 1999/2000 IAIN Suska telah pula membuka Program Studi Teknik Informatika. Satu tahun kemudian, tepatnya tahun akademik 2000/2001, dibuka pula Program Studi Teknik Industri. Kedua





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

program studi terakhir ini untuk sementara ditempatkan di bawah administrasi Fakultas Dakwah.<sup>26</sup>

Pada tahun akademik 2002/2003 program studi umum yang ada pada fakultas di atas dan ditambah beberapa program studi baru, ditingkatkan menjadi fakultas yang berdiri sendiri. Fakultas-fakultas tersebut adalah Fakultas Sains dan Teknologi dengan Jurusan/Program Studi Teknik Informatika, Teknik Industri, Sistem Informasi, dan Matematika; Fakultas Psikologi dengan Jurusan/Program Studi Psikologi; Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dengan Program Studi Manajemen, Akuntansi dan Manajemen Perusahaan Diploma III; dan Fakultas Peternakan dengan program studi Ilmu Ternak dengan konsentrasi Teknologi Produksi Ternak, Teknologi Hasil Ternak dan Teknologi Pakan dan Nutrisi.

Dengan demikian, pada tahun akademik 2002/2003, IAIN Susqa sebagai persiapan UIN Suska Riau telah mempunyai 8 fakultas, yaitu: Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syariah, Fakultas Ushuluddin, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Psikologi, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Peternakan. Peningkatan status IAIN menjadi UIN dimaksudkan untuk menghasilkan sarjana muslim yang mampu menguasai, mengembangkan, dan menerapkan ilmu ke-Islaman,

---

<sup>26</sup>*Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ilmu pengetahuan dan teknologi secara intergral, sekaligus menghilangkan pandangan dikhotomi antara ilmu keislaman dan ilmu umum.<sup>27</sup>

Pengembangan UIN Suska Riau tidak hanya dilakukan pada bidang akademik semata, seperti melalui pembukaan fakultas-fakultas dan program-program studi baru, tapi juga diarahkan pada pengembangan di bidang fisik, sarana, dan prasarana. Dewasa ini UIN Suska Riau telah mempunyai lahan kampus seluas 84,15 Ha yang terdiri atas 3,65 Ha di Jl. K.H. Ahmad Dahlan dan 80,50 Ha di km. 15 Jl. Soebrantas Simpangbaru Panam Pekanbaru. Lahan kampus di km 15 Jl. H.R. Soebrantas tersebut dibebaskan pada tahun 1981/1998 mulanya seluas 60 Ha dan diperluas pada tahun 2003- 2006 menjadi 80,50 Ha. Pada tahun 1995/1996 pembangunan fisik di lahan ini telah dimulai dan telah berhasil membangun gedung seluas 5.670 m<sup>2</sup> untuk 70 lokal ruang kuliah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Suska Riau dan Peraturan Menteri Agama RI No 56 Tahun 2006 tentang Perubahan atas PMA RI Nomor 8 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Suska Riau, maka UIN Suska Riau memiliki 8 fakultas, yaitu: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Ushuluddin, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Sains dan Teknologi,

---

<sup>27</sup> *Ibid*, h.2.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fakultas Psikologi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu sosial, dan Fakultas Pertanian dan Peternakan.<sup>28</sup>

Sejak berdirinya IAIN Susqa sampai menjadi uin suska hingga sekarang ini telah beberapa kali mengalami pergantian pimpinan, dapat dilihat ada tabel II.1 sebagai berikut:

**Tabel II.1**  
**Pimpinan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau**  
**Periode 1970 - 2022**

No	Nama	Periode
1	Prof. H. Ilyas Muh. Ali	1970-1975
2	Drs. H. A. Moerad Oesman	1975-1979
3	Drs. H. Soewarno Ahmady	1979-1987
4	Drs. Yusuf Rahman, MA	1987-1996
5	Prof. Dr. Amir Luthfi	1996-2000
6	Prof. Dr. Amir Luthfi	2000-2005
7	Prof. Dr. H. M. Nazir	2005-2010
8	Prof. Dr. H. M. Nazir	2010-2014
9	Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA	2014-2018
10	Prof. KH. Akhmad Mujahidin, S.Ag, M.Ag	2018-2022

Sumber: UIN Suska Riau, *Sejarah Ringkas Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, <https://uin-suska.ac.id/profil/sejarah-ringkas-universitas/>, Diakses Pada Sabtu 4 April.

<sup>28</sup>*Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2. Visi, Misi, Karakteristik dan Tujuan**

**Visi**

"Visi UIN Suska Riau adalah terwujudnya Universitas Islam Negeri sebagai lembaga pendidikan pilihan utama pada tingkat dunia yang mengembangkan agama Islam, ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau senior integral pada tahun 2023".

**Misi**

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional serta memiliki integritas pribadi sebagai sarjana muslim;
- b. Menyusun penelitian dan pengkajian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni menggunakan paradigma Islami;
- c. Menyelenggarakan pengabdian bagi masyarakat yang menggunakan ilmu pengetahuan teknologi dan/atau seni menggunakan paradigma Islami;
- d. Menyelenggarakan tatapamong perguruan tinggi yang otonom, akuntabel, dan transparan yang menjamin peningkatan kualitas berkelanjutan.

**Karakteristik**

1. Pengembangan paradigma ilmu yang memberi penekanan pada rasa iman dan tauhid (*belief affection*).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pengembangan berbagai cabang ilmu pengetahuan dengan menggunakan religius membuat nilai-nilai Islam menjadi roh bagi setiap cabang ilmu pengetahuan dengan penerapan prinsip Islam dalam Disiplin Ilmu (IDI) sebagai upaya nyata mewujudkan integrasi ilmu pengetahuan dengan Islam.
3. Penyelenggaraan beberapa disiplin ilmu untuk mencapai standar kompetensi ilmu-ilmu keislaman yang menguatkan domain akidah, ibadah, muamalah dan akhlak
4. Program pembinaan dan pengembangan lingkungan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam melalui program Ma'had 'Al-jami'ah.
5. Perwujudan keunggulan akademik dan profesionalisme yang didasarkan pada moral keagamaan dalam kehidupan kampus.
6. Pengembangan studi Islam Regional Asia Tenggara dan Tamaddun Melayu sebagai pusat keunggulan (*cente of excellence*).

#### Tujuan

- a. Menghasilkan keberhasilan yang berakhlak mulia dan menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan memenuhi persyaratan akademik dan/atau profesional yang dapat mendukung, mengembangkan, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau senior yang bernafaskan Islam;
- b. Mengembangkan dan menyebarkanluaskan ilmu agama Islam, ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau senior serta mengupayakan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penggunaannya untuk meningkatkan martabat dan taraf kehidupan masyarakat serta memperkaya budaya nasional;

- c. Menghasilkan karya ilmiah dan karya kreatif yang unggul berkelas dunia;
- d. Menghasilkan keuangan yang efektif untuk menjamin pertumbuhan kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang berkelanjutan.

### 3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tatakerja UIN Sultan Syarif Kasim Riau serta Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tatakerja UIN Sultan Syarif Kasim Riau dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sultan Syarif Kasim Riau, organisasi Universitas terdiri dari Organ Pengelola, Organ Pertimbangan dan Organ Pengawas.<sup>29</sup>

1. Organ Pengelola Universitas terdiri dari :
  - a. Rektor dan Wakil Rektor
  - b. Fakultas
    - 1) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan.
    - 2) Fakultas Syariah dan Hukum.

<sup>29</sup>Ibid, h.7

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Fakultas Ushuluddin.
- 4) Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
- 5) Fakultas Sains dan Teknologi.
- 6) Fakultas Psikologi.
- 7) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
- 8) Fakultas Pertanian dan Peternakan.
- c. Pascasarjana
- d. Biro
  - 1) Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan.
  - 2) Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama.
- e. Lembaga
  - 1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
  - 2) Lembaga Penjamin Mutu.
- f. Unit Pelaksana Teknis
  - 1) Pusat Perpustakaan.
  - 2) Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data.
  - 3) Pusat Pengembangan Bahasa.
  - 4) Pusat Mah'ad Al-Jami'ah.
  - 5) Pusat Pengembangan Bisnis.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Organ Pertimbangan Universitas terdiri dari:
  - a. Dewan Penyantun
  - b. Senat Universitas
  - c. Senat Fakultas
3. Organ Pengawasan Universitas terdiri dari:
  - a. Satuan Pemeriksa Intern
4. Organ Pengelola Fakultas terdiri dari:
  - a. Dekan dan Wakil Dekan
  - b. Kepala Bagian Tata Usaha
  - c. Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan
  - d. Kepala Subbagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni
  - e. Kepala Jurusan dan Sekretaris Jurusan

### B. Organisasi Kemahasiswaan

#### 1. Pengertian Organisasi Mahasiswa

Organisasi berasal dari kata organ (Sebuah kata dalam bahasa Yunani) yang berarti alat. Organisasi sebagai wadah yang memiliki multi peran dan didirikan dengan tujuan manpu memberikan serta mewujudkan keinginan berbagai pihak, dan tidak terkecuali kepuasan bagi pemiliknya.

Beberapa definisi organisasi menurut para ahli adalah sebagai berikut:

1. Menurut Stephen P. Robbins (1991:4), organisasi adalah kesatuan (*entity*) sosial yang dikordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi yang bekerja atas dasar



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.<sup>30</sup>

2. Menurut Barnard (1968), organisasi sebagai kumpulan individu yang terkoordinasi secara sadar, sehingga bisa juga dinyatakan sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai kegiatan yang saling berhubungan.<sup>31</sup>
3. Menurut Sondang P. Siagian (1980), organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama untuk mencapai sesuatu tujuan bersama dan terikat secara formal dalam suatu ikatan hierarki dimana selalu terdapat hubungan antara seorang atau sekelompok orang yang disebut pimpinan dan seorang atau sekelompok yang disebut bawahan.<sup>32</sup>

Berdasarkan definisi para ahli diatas dapat di simpulkan bahwa organisasi adalah kumpulan individu atau suatu kelompok yang memiliki hubungan struktural di dalamnya bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu.

<sup>30</sup> Irham Fahmi, *Perilaku Organisasi Teori, Aplikasi, dan Kasus*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h.1-2.

<sup>31</sup> Yusuf Hadijaya, *Op.Cit*, h. 14.

<sup>32</sup> Syaiful Sagala, *Memahami Organisasi Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.15.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beberapa definisi mahasiswa menurut para ahli sebagai berikut:

1. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), mahasiswa adalah seseorang yang belajar diperguruan tinggi, di dalam struktur pendidikan di Indonesia mahasiswa memegang status pendidikan tertinggi diantara yang lain.
2. Menurut Knopfemacher, mahasiswa adalah insan-insan calon sarjana yang keterlibatannya dengan perguruan tinggi, dididik dan diharapkan menjadi calon-calon intelektual.
3. Menurut Sarwono, mahasiswa sebagai setiap orang yang secara resmi terdaftar untuk mengikuti pelajaran di perguruan tinggi dengan batas usia sekitar 18-30 tahun.<sup>33</sup>

Organisasi mahasiswa adalah suatu kelompok orang/mahasiswa yang berkumpul dan terikat pada lingkungan Universitas/Institusi/Sekolah Tinggi, yang memiliki pembagian struktural dalam pelaksanaannya untuk mencapai tujuan dari setiap organisasi mahasiswa sesuai dengan tugas-tugas pokok dan wewenangnya yang telah ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku. Organisasi mahasiswa merupakan wahana pengembangan potensi mahasiswa sebagai sivitas akademik (masyarakat akademik), pengembangan wawasan dan intelektual, bakat dan minat, pelatihan keterampilan manajemen organisasi dan kepemimpinan mahasiswa.

---

<sup>33</sup>*Ibid*, h.15.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Tujuan Organisasi Kemahasiswaan

Keberagaman latar belakang, bentuk dan tujuan organisasi mahasiswa, wujud lingkunganlah yang mempengaruhi organisasi mahasiswa yang menentukan corak dan efektifitasnya.<sup>34</sup> Untuk melaksanakan fungsi akademik, perguruan tinggi memberikan sivitas akademika khususnya mahasiswa, dapat melaksanakan tugas akademiknya dengan baik. Fungsi-fungsi akademik ini dapat berupa kegiatan yang bersifat kurikuler dan pembinaan yang bersifat ekstra-kurikuler.<sup>35</sup>

Huruf C Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam menyebutkan tujuan organisasi mahasiswa adalah sebagai berikut:<sup>36</sup>

1. Mendorong mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian yang bernuansa Islami.
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni, bakat dan minat serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan

<sup>34</sup> Arbi Sanit, Mahasiswa, *Kekuasaan dan Bangsa Refleksi dan Gagasan Alternatif*, (Jakarta: Lingkaran Studi Indonesia dan Yayasan LBH Indonesia, 1989), h.92.

<sup>35</sup> A. Malik Fadjar dan Muhdjir Effendy, *Op.Cit*, h. 9-10.

<sup>36</sup> Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, Huruf C.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperkaya kebudayaan nasional yang bernuansa Islami dan berwawasan kebangsaan.

### 3. Dasar Hukum Organisasi Kemahasiswaan

Indonesia merupakan negara hukum, hal sebagaimana tertuang di dalam konstitusi UUD NKRI 1945 Pasal 1 Ayat (3). Dengan demikian negara Indonesia bersendikan hukum baik berbangsa dan bernegara. Hukum bertujuan untuk menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum, serta mendapatkan kemanfaatan didalam masyarakat.<sup>37</sup> Menurut Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan oleh karena itu seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.<sup>38</sup>

Berangkat dari hal diatas, maka organisasi kemahasiswaan tidak terlepas pula dari hukum sebagai aturan yang mengaturnya. Dasar hukum organisasi kemahasiswaan disuatu Universitas/Institut/Sekolah Tinggi diselenggarakan berdasarkan prinsip sebagai wahana proses pendidikan kepada mahasiswa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Organisasi kemahasiswaan perguruan tinggi keagamaan Islam yang berada dibawah Kementerian Agama Republik Indonesia, diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun

<sup>37</sup> Lysa Angrayni, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Pekanbaru: Suska Press, 2014), h.31.

<sup>38</sup> *Ibid*, h.22.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun

2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam mengatur dasar organisasi kemahasiswaan, tujuan organisasi kemahasiswaan, bentuk organisasi kemahasiswaan, struktur organisasi kemahasiswaan, kedudukan, fungsi dan tanggungjawab organisasi kemahasiswaan, tugas dan wewenang organisasi kemahasiswaan, dan sanksi organisasi kemahasiswaan.

Berdasarkan kepastian hukum tersebut, maka organisasi kemahasiswaan termasuk kategori organisasi formal karena secara struktur dan wewenang telah disebutkan dengan jelas kedudukan, fungsi dan tanggung jawab.<sup>39</sup>

#### 4. Organisasi Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Universitas sebagai bagian dari lingkungan sosial kemasyarakatan menjadi tempat penguatan kapasitas intelektual mahasiswa secara ilmiah dan sebagai tempat pembentukan moral dan kepribadian mahasiswa melalui kegiatan organisasi kemahasiswaan yang ada didalamnya. Berbagai kegiatan kemahasiswaan diselenggarakan dalam rangka mendukung terciptanya kepribadian mahasiswa. UIN Suska Riau juga menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan sebagai wadah bagi

<sup>39</sup> Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan, Huruf F.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mahasiswa yang ingin menyalurkan minat, bakat dan kegemarannya di bidangnya masing-masing.

Adapun organisasi kemahasiswaan yang ada di UIN Suska Riau, terdiri dari sebagai berikut:

1. Organisasi kemahasiswaan di tingkat UIN Suska Riau dapat dibedakan kedalam tiga jenis, yaitu:<sup>40</sup>
  - a. Senat Mahasiswa (SEMA), sebagai lembaga normatif atau legislatif mahasiswa.
  - b. Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA), sebagai lembaga eksekutif mahasiswa.
  - c. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) terdiri dari:<sup>41</sup>

- 1) **Seni**, membidangi Sanggar Latah Tuah, *Qasimiah Orchestra*, Paduan Suara, Hadroh, Mawaris, Barzanji dan Marhaban, Rebana, Kompang, Balas Pantun, Desain Busana, Nasyid dan *Stand Up Comedy*.
- 2) **Olahraga**, membidangi Himpunan Pencak Silat Indonesia (HIMPSI), Karate, Taekwondo, Bola Voli, Bulu Tangkis, Basket, Tenis Meja, Bola Kaki, Panjat

<sup>40</sup> Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, Huruf D.

<sup>41</sup> Pengumuman Nomor 2758/Un.04/WR.3/PP.03/08/2019 Tentang Seleksi Serentak Calon Ketua Unit Kegiatan Khusus (UKK) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Masa Bakti 2019-2020. h.3.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dinding, Futsal, Takraw, Panahan, Catur, *Fun Bike* dan Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra).

3) **Lembaga Pengembangan Prestasi Akademik (LP2A)**, membidangi Seni Baca Quran, Tahfizul Quran, Syahril Quran, Fahmil Quran, Qira'atul Kutub, Khaligrafi, Puitisasi al-Quran/Hadis, Bahasa Asing, Makalah al-Quran, Debat Konstitusi, Da'i Da'iyah, *Marching Band* dan *Event Organizer*.

4) **Lembaga Pengembangan Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPRPM)**, membidangi Robotik, Film Pendek, Karya Inovasi, Duta UIN SUSKA Riau, Pengembangan Media Pembelajaran, *Business Plan*, Teknologi Tepat Guna, Program Kembali ke Desa, UIN SUSKA Mengajar, *Entrepreneurship*, Ta'mir Masjid dan Bimbingan Konseling.

#### d. Unit Kegiatan Khusus (UKK)

Unit Kegiatan Khusus (UKK) terdiri dari:<sup>42</sup>

- 1) Pramuka.
- 2) Resimen Mahasiswa (Menwa).
- 3) Korps Sukarela Palang Merah Indonesia (KSR PMI).
- 4) Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala).

<sup>42</sup>*Ibid*, h.2.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Koperasi Mahasiswa (Kopma).

6) Lembaga Penerbitan Mahasiswa “Gagasan”.

2. Organisasi kemahasiswaan di tingkat Fakultas UIN Suska Riau dapat dibedakan kedalam tiga jenis, yaitu:<sup>43</sup>

- a. Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA-F).
- b. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (DEMA-F).
- c. Himpunan Mahasiswa Jurusan/Prodi (HMJ/HM-PS).
- d. Unit kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKM-F)

Unit kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKM-F) merupakan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang berada pada tingkat Fakultas. Namun semenjak penerapan dan pembenahan organisasi mahasiswa oleh pimpinan UIN Suska Riau dengan bepedoman kepada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Maka UKM-F telah melebur dan berada dibawah koordinasi DEMA Fakultas.

<sup>43</sup> Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, Huruf D.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Teori Wewenang

##### 1. Pengertian Wewenang

Menurut kamus besar bahasa indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.<sup>44</sup>

Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan “*authority*” dalam bahasa Inggris dan “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda. *Authority* dalam *Black’s Law Dictionary* diartikan sebagai kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik. *Bevoegdheid* dalam istilah hukum Belanda, Phiipus M. Hadjon memberikan catatan berkaitan dengan penggunaan istilah “wewenang” dan “*bevoegdheid*”. Istilah “*bevoegdheid*” digunakan dalam konsep hukum privat dan hukum publik, sedangkan “wewenang” selalu digunakan dalam konsep hukum publik.<sup>45</sup>

Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh

<sup>44</sup>Kamal Hidjaz,. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, (Makasar: Pustaka Refleksi, 2010), h.35.

<sup>45</sup> Abdul Latif, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h.6

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.<sup>46</sup>

Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebutkan sebagai konsep inti dalam Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara.

Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*) dan mengelola sendiri (*zelfbesturen*), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.

Dalam negara hukum, yang menempatkan asas legalitas sebagai sendi utama penyelenggaraan pemerintahan, wewenang pemerintahan (*bestuursbevoegdheid*) itu berasal dari peraturan perundang-undangan. R.J.H.M. Huisman menyatakan bahwa, organ pemerintahan tidak dapat

<sup>46</sup> Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.98.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menganggap bahwa ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang. Membuat undang-undang dapat memberikan wewenang pemerintahan tidak hanya kepada organ pemerintahan, tetapi juga terhadap para pegawai (misalnya inspektur pajak, inspektur lingkungan, dan sebagainya). Atau terhadap badan khusus (seperti dewan pemilihan umum, pengadilan khusus untuk perkara sewa tanah), atau bahkan terhadap badan hukum privat).<sup>47</sup>

## 2. Sumber dan Cara Memperoleh Wewenang Pemerintahan

Seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas, maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Indroharto mengatakan bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru. Lebih lanjut disebutkan bahwa legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan dibedakan antara:

- a. Yang berkedudukan sebagai *original legislator*; dinegara kita di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi dan DPR bersama-sama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-

<sup>47</sup>Ibid, h.99-100.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undang, dan tingkat daerah adalah DPRD dan Pemerintahan Daerah yang melahirkan Peraturan Daerah.

- b. Yang bertindak sebagai *delegated legislator*; seperti Presiden yang berdasar pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan Peraturan Pemerintah diberikan wewenang-wewenang pemerintah kepada Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara tertentu.

Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya atribusi wewenang.<sup>48</sup>Wewenang yang diperoleh secara “mandat” yaitu tidak adanya suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain.<sup>49</sup>

Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen ini dimaksudkan agar pejabat negara tidak menggunakan wewenangnya diluar tujuan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya. Komponen ini bertujuan agar setiap

<sup>48</sup> *Ibid*, h.101.

<sup>49</sup> Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Pustaka Harapan, 1993), h.90.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tindakan pemerintahan atau pejabat negara harus selalu mempunyai dasar hukum dalam hal bertindak. Komponen komformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Komponen ini menghendaki agar setiap tindakan pemerintahan atau pejabat negara mempunyai tolak ukur atau standar yang bersifat umum untuk semua jenis wewenang yang bertumpuk pada legalitas tindakan.<sup>50</sup>

Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Kemudian Philipus M Hadjon pada dasarnya membuat perbedaan antara delegasi dan mandat. Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas "*contrarius actus*". Artinya, setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundang-undangan, dilakukan oleh pejabat yang

<sup>50</sup> Abdul Latif, *Op.Cit*, h.7.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi. Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.<sup>51</sup>

Menurut Bagir Manan, menyatakan dalam Hukum Tata Negara, kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.<sup>52</sup>

<sup>51</sup> Ridwan HR, *Op.Cit*, h.108-109.

<sup>52</sup> Bagir Manan. *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*, (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2000), h.1-2.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## B. Teori Diskresi

### 1. Pengertian Diskresi

Secara etimologis, diskresi (*discretion*) mengandung akar kata *discrenere* (latin). Kata ini dalam bahasa Inggris memiliki padanan dengan kata *discernment* dan *judgment*. Pengertian tersebut mirip dengan makna leksikalnya dalam *Black's Law Dictionary* yang mengartikan diskresi sebagai:<sup>53</sup>

- a. *Wise conduct and management; cautious discernment; prudence*  
(sikap kebijaksanaan dan manajemen; kebijakan dengan penuh kehati-hatian; kebijakan).
- b. *Individual judgment; the power of free decision-making*  
(penilaian individu; kekuasaan bebas membuat suatu keputusan).

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 Butir(9) menyebutkan bahwa “*diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan*”.<sup>54</sup>

<sup>53</sup>Krishna Djaya Darumurti, *Diskresi Kajian Teori Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016), h.23.

<sup>54</sup> Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 Butir(9).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dwiyanto mengemukakan bahwa diskresi secara konseptual merupakan suatu langkah yang ditempuh oleh administrator untuk menyelesaikan kasus tertentu yang tidak atau belum diatur dalam regulasi yang baku. Dalam konteks tersebut, diskresi dapat berarti suatu bentuk kelonggaran pelayanan yang diberikan oleh administrator kepada pengguna jasa. Pertimbangan melakukan diskresi adalah adanya realitas bahwa suatu kebijakan atau peraturan tidak mungkin mampu merespons banyak aspek dan kepentingan semua pihak sebagai akibat adanya keterbatasan prediksi para aktor atau *stakeholders* dalam proses merumuskan kebijakan atau peraturan.<sup>55</sup>

Dalam pengertian lain, diskresi juga memiliki *term* yang sering digunakan dalam lapangan hukum administrasi negara, yaitu *freies ermessen*. Secara bahasa, *freies ermessen* berasal dari kata *frei* yang artinya bebas, lepas, tidak terikat, dan merdeka. *Freies* artinya orang yang bebas, tidak terikat, dan merdeka. Sementara itu, *ermessen* berarti mempertimbangkan, menilai, menduga, dan memperkirakan.<sup>56</sup> Jadi diskresi atau *freies ermessen* merupakan orang (pejabat pemerintah) yang memiliki kapasitas kebebasan untuk menilai, menduga, dan mempertimbangkan sesuatu, utamanya dalam hal membuat dan melaksanakan peraturan kebijaksanaan.

<sup>55</sup> Hassel Nogi S. Tangkilisan, *Manajemen Publik*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), h.243.

<sup>56</sup> Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Permata Aksara, 2016), h.62.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Definisi lain diberikan oleh Nana Saputra, diskresi yakni suatu kebebasan yang diberikan kepada alat administrasi, yaitu kebebasan yang pada dasarnya memperkenalkan alat administrasi, mengutamakan keefektifan tercapainya suatu tujuan (*doelmatigheid*) dibandingkan berpegang teguh kepada ketentuan hukum, atau kewenangan yang sah untuk turut campur dalam kegiatan sosial guna melaksanakan tugas-tugas kepentingan umum. Bachsan Mustafa menyebutkan bahwa diskresi (*freies ermessen*) diberikan kepada pemerintah mengingat fungsipemerintah atau administrasi negara, yaitu menyelenggarakan kesejahteraan umum yang tentunya berbeda dengan fungsi kehakiman dalam menyelesaikan sengketa antar penduduk. Keputusan pemerintah lebih mengutamakan pencapaian tujuan atau sasarannya (*doelmatigheid*) dibandingkan dengan hukum yang berlaku (*rechtmatigheid*).<sup>57</sup>

## 2. Dasar Hukum dan Asas Diskresi

Menggunakan diskresi sesuai dengan tujuannya merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan. Hal ini sebagaimana diatur didalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 6 Ayat (2) Butir (e).

Konsep diskresi dimaknai sebagai kebebasan bertindak yang menyimpang dari undang-undang atau apabila undang-undang tidak

<sup>57</sup>Ridwan HR, *Op. Cit*, h.170.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan jawaban penyelesaian secara eksplisit maupun solutif terhadap suatu tindakan. Sesuai dengan dalil bahwa diskresi merupakan produk hukum, bukan produk undang-undang sebagaimana hakikat dari diskresi yang menyimpang dari undang-undang, maka perlu diterangkan lebih dulu perbedaan hukum dan undang-undang yang kemudian dapat menjadi arah dan gambaran mengenai dasar hukum diskresi serta kedudukan diskresi terhadap undang-undang yang dikesampingkan.

Perbedaan hukum dan undang-undang dapat dijumpai secara etimologis, yaitu “*ius* atau *law*” (hukum) dan “*lex* atau *laws*” (undang-undang). Ruang lingkup hukum bersifat universal yang keberadaannya sudah ada sebelumnya (*apriori*), sedangkan undang-undang bersifat *a posteriori* yang dibuat oleh penguasa dengan orientasi situasi kondisi lokal atau setempat. Hukum berfungsi sebagai landasan etis yang harus diimplementasikan oleh undang-undang. Artinya, undang-undang yang tidak berlandaskan hukum dianggap sewenang-wenang. Dengan demikian, hukum harus menjadi dimensi etis atau moral dari undang-undang agar tidak terjadi penyelewengan. Berkenaan dengan hal itu, konsep diskresi dibenarkan oleh hukum (*ius*), sekaligus membenarkan tindakan pemerintah meskipun tidak berdasarkan undang-undang.<sup>58</sup>

<sup>58</sup>Amri Islamuddin, *Skripsi: Konsep Diskresi Pejabat Pemerintah (Telaah Ketatanegaraan Islam*, (Makasar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2019), h.26. [repository.uin-alauddin.ac.id/14472/](https://repository.uin-alauddin.ac.id/14472/), Diakses Pada Sabtu 9 Mei 2020.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berkaitan dengan dasar hukum yang melandasi keabsahan konsepsi diskresi, secara legalistik-positivistik asas legalitas menjadi dasar keharusan bagi pemerintah untuk melakukan suatu tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi, kerangka asas legalitas pada suatu negara modern tidak sepenuhnya menjawab segala tantangan dan problematika publik yang semakin kompleks. Padahal, pergeseran negara dari konsep negara “*nachwachterstaat*” menuju negara kesejahteraan (*welfare state*) mengharuskan pemerintah untuk memberikan pelayanan umum yang semaksimal mungkin demi terciptanya kesejahteraan umum bagi warga negara. Atas dasar itu, konsep diskresi selain menjadi pelengkap dari kelemahan atau kekurangan asas legalitas, juga sangat inheren dengan cita-cita (*ius constituendum*) negara Indonesia yang termaktub dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>59</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur landasan hukum konsep diskresi, hal ini sebagaimana tertuang didalam Pasal 22 Ayat (1) menyebutkan bahwa “*Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang*”<sup>60</sup>

<sup>59</sup> *Ibid*, h.27.

<sup>60</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22 Ayat (1).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut menentukan adanya instrumen Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) yang dapat ditetapkan oleh Presiden dengan pertimbangan adanya hal ihwal kegentingan yang memaksa yang mengharuskan Presiden menetapkan suatu kebijakan atau melakukan tindakan yang melanggar undang-undang yang sah. Untuk itu diperlukan perubahan atas undang-undangitu, tetapi waktu yang tersedia tidak mencukupi, sementara tindakan atau kebijakan yang bersangkutan sudah mendesak dan dibutuhkan penyelesaian segera, maka timbullah keadaan “*hal ihwal kegentingan yang memaksa.*”<sup>61</sup>

Didalam Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditemukan unsur-unsur kebebasan bertindak pemerintah, yaitu Presiden sebagai penanggungjawab atas bangsa dan negaradalam hal menciptakan kondisi yang dapat menguntungkan warga negara, maka Presiden diberikan kebebasan untuk menetapkan suatu kebijakan berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) sebagai antisipasi adanya kondisi yang tiba-tiba timbul atau mendesak, tanpa harus menunggu perintah dari badan legislatif.

Dengan adanya kewenangan Presiden untuk membuat dan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, tentunya mengindikasikan kepada pejabat pemerintah atau alat-alat perlengkapan

<sup>61</sup>Amri Islamuddin, *Op.Cit.* h.28.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

administrasi negara untuk membentuk peraturan atas inisiatif sendiri berdasarkan diskresi. Namun penggunaan diskresi haruslah berdasarkan pada ketentuan hierarki perundang-undangan.<sup>62</sup>

Hal-hal penting menyangkut diskresi yang diatur didalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut:<sup>63</sup>

1. Diskresi hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang berwenang (Pasal 22 Ayat (1));
2. Setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk pasal Pasal 22 Ayat (2) dan penjelasan:
  - a. Melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;
  - b. Mengisi kekosongan hukum; dan
  - c. Mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Adapaun yang dimaksud dengan stagnasi pemerintahan adalah tidak dapat dilaksanakannya aktivitas pemerintahan sebagai akibat kebutuhan atau difungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, contohnya: keadaan bencana alam atau gejolak politik.

<sup>62</sup>Ibid. h.29.

<sup>63</sup> Eri Yulikhshan, *Keputusan Diskresi Dalam Dinamika Pemerintahan (Aplikasi Dalam PTUN)*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016) h.4-5.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Diskresi pejabat pemerintahan meliputi (Pasal 33):
  - a. Pengambilan keputusan dan/atau tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan keputusan dan/atau tindakan;
  - b. Pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur;
  - c. Pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas; dan
  - d. Pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.
4. Pejabat pemerintahan yang menggunakan diskresi harus memenuhi syarat (Pasal 24):
  - a. Sesuai dengan tujuan diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (2);
  - b. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUBP);
  - d. Berdasarkan alasan-alasan yang objektif;
  - e. Tidak menimbulkan konflik kepentingan; dan
  - f. Dilakukan dengan itikad baik.
5. Penggunaan diskresi yang berpotensi mengubah alokasi anggaran wajib memperoleh persetujuan dari atasan pejabat sesuai dengan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentuan peraturan perundang-undangan. Persetujuan dimaksud dilakukan apabila penggunaan diskresi menimbulkan akibat hukum yang berpotensi membebani keuangan negara (Pasal 25 Ayat (1) dan (2)).

Sebagai produk dalam konfigurasi negara kesejahteraan, diskresi berupaya membantu tugas pemerintah dalam memberikan pelayanan yang prima bagi warga negara, dengan prinsip yang menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh menolak untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan alasan tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya atau belum/tidak ada peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum.<sup>64</sup>

### C. Rektor

#### 1. Pengertian Rektor

Rektor adalah (bahasa Latin: *regera* yang berarti guru). Rektor adalah istilah yang umumnya digunakan untuk pemimpin perguruan tinggi di Indonesia dan beberapa negara lainnya.<sup>65</sup> Dalam pengertian akademis Rektor merupakan jabatan pimpinan utama dari lembaga

<sup>64</sup> Ridwan HR, *Op.Cit*, h.172-173

<sup>65</sup> Wikipedia, *Rektor*, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Rektor>, Diakses Pada Jumat 8 Mei

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan formal, pada umumnya merupakan lingkup perguruan tinggi (universitas dan institusi).<sup>66</sup>

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sultan Syarif Kasim Riau Pasal 24 dan 25 menyebutkan bahwa *“Rektor merupakan pemimpin dalam penyelenggaraan universitas. Rektor bertanggung jawab kepada menteri, diangkat dan diberhentikan oleh menteri.”*<sup>67</sup>

## 2. Tugas dan Kewajiban Rektor

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sultan Syarif Kasim Riau Pasal 26 menyebutkan tugas dan kewajiban Rektor sebagai berikut.<sup>68</sup>

- 1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
  - a. menyiapkan rencana strategis Universitas;
  - b. melaksanakan otonomi Perguruan Tinggi bidang manajemen organisasi, akademik, kemahasiswaan, sumber daya manusia, sarana prasarana dan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

<sup>66</sup> Universitas Pendidikan Indonesia, *Museum Pendidikan Nasional: Rektor Dari Masa Ke Masa*, <http://museumpendidikannasional.upi.edu/index.php/rektor-dari-masa-ke-masa>, Diakses Pada Jumat 8 Mei 2020.

<sup>67</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, Pasal 24 dan 25.

<sup>68</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, Pasal 26.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. mengelola pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat;
- d. mengangkat dan memberhentikan pejabat di bawah Rektor, pimpinan Fakultas, dan pimpinan unit lain yang berada di bawahnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mengangkat dan memberhentikan pegawai yang berstatus bukan pegawai negeri sipil (nonPNS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan fungsi manajemen Universitas yang baik;
- g. membina dan mengembangkan hubungan baik Universitas dengan lingkungan dan masyarakat pada umumnya;
- h. mengusulkan pembukaan, penggabungan, dan/atau penutupan Fakultas, Jurusan dan/atau Program Studi yang dipandang perlu, atas persetujuan Senat kepada Menteri; dan
- i. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan Universitas kepada Menteri.

2) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berwenang untuk dan atas nama Menteri:

- a. mewakili Universitas di dalam dan di luar pengadilan;
- b. melakukan kerja sama; dan
- c. memberikan gelar doktor kehormatan (*doctor honoris causa*).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Didalam mengelola dan menyelenggarakan perguruan tinggi Rektor dibantu oleh 3 (tiga) wakil Rektor, sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sultan Syarif Kasim Riau Pasal 27, sebagai berikut:<sup>69</sup>

- 1) Dalam mengelola dan menyelenggarakan Universitas, Rektor dibantu oleh paling banyak 3 (tiga) wakil Rektor.
- 2) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- 3) Masa jabatan Wakil Rektor mengikuti masa jabatan Rektor dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- 4) Wakil Rektor dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
- 5) Pembidangan tugas dan kewenangan masing-masing wakil Rektor terdiri dari bidang:
  - a. bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga;
  - b. bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan;  
dan
  - c. bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.

<sup>69</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, Pasal 27.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar hukum diskresi Rektor dalam pemilihan ketua kelembagaan SEMA dan DEMA Universitas dan Fakultas di lingkungan UIN Suska Riau masa bakti tahun 2019-2020 karena terjadi *vacum of power* atau kekosongan kekuasaan SEMA dan DEMA UIN Suska Riau masa bakti tahun 2019-2020 sejak 28 Februari 2019. Rektor diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan sebagai pejabat tata usaha negara untuk mengelola organisasi kemahasiswaan sebagaimana tertuang didalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pasal 26 Ayat (1) menyebutkan tugas dan kewajiban Rektor UIN Suska Riau dalam mengelola perguruan tinggi.
2. Pelaksanaan pemilihan ketua SEMA dan DEMA Universitas serta Fakultas di lingkungan UIN Suska Riau masa bakti tahun 2019-2020 tidak terlaksana dengan baik karena pemilihan tidak diikuti oleh seluruh Fakultas di lingkungan UIN Suska Riau, sehingga untuk beberapa Fakultas dikembalikan kepada Dekan untuk menunjuk calon ketua SEMA dan DEMA Fakultas. Ketua SEMA dan DEMA Fakultas diserahkan kepada Tim *Ad Hoc* dan Tim *Fit and Proper Test* untuk diserahkan kepada Rektor.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pelaksanaan pemilihan ketua kelembagaan mahasiswa apabila terjadi *vacum of power* SEMA dan DEMA Universitas serta Fakultas di lingkungan UIN Suska Riau, Rektor dapat membentuk kembali Tim *Ad Hoc* dan Tim *Fit and Proper Test*. Namun dengan mempertimbangan peristiwa yang terjadi pada pemilihan ketua kelembagaan SEMA dan DEMA Universitas serta Fakultas di lingkungan UIN Suska Riau masa bakti tahun 2019-2020, serta dengan memperhatikan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga tercipta penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan yang baik dalam suatu negara hukum.

#### B. Saran

Untuk bisa diterapkan dengan baik Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di UIN Suska Riau, maka penulis mencoba memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlunya sosialisasi yang masif oleh pimpinan universitas dan ketua organisasi kemahasiswaan khususnya SEMA sebagai lembaga legislatif mahasiswa agar lebih optimal lagi memberikan sosialisasi Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam kepada mahasiswa UIN Suska Riau. Sehingga mahasiswa dapat memahami peraturan dan sistem baru yang akan diterapkan di UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk SEMA Universitas dan Fakultas sebagai lembaga legislatif mahasiswa agar tidak kaku dalam membuat AD/ART organisasi mahasiswa UIN Suska Riau berdasarkan tinjauan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di UIN Suska Riau. Pada pemilihan masa bakti selanjutnya, SEMA mengembangkan peraturan tersebut sesuai dengan keinginan dan kultur budaya mahasiswa agar terciptanya kehidupan kampus yang demokratis. Misalnya dalam pemilihan selanjutnya akan mendapatkan perubahan dengan gagasan atau ide baru, seperti adanya kampanye calon ketua SEMA dan DEMA, debat kandidat calon ketua SEMA dan DEMA. Hal ini bertujuan agar mahasiswa mengenal calon ketua dan mengetahui kualitas calon ketua SEMA dan DEMA yang akan memimpin mereka pada masa bakti selanjutnya baik pada tingkat Universitas dan Fakultas.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Al Malik Fadjar dan Muhdjir Effendy, *Dunia Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan*, Cet.Ke-2, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 1998.
- Abdul Aziz Wahab, *Anatomi Organisasi Dan Kepemimpinan Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Abdul Latif, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Arbi Sanit, *Mahasiswa, Kekuasaan dan Bangsa Refleksi dan Gagasan Alternatif*, Jakarta: Lingkaran Studi Indonesia dan Yayasan LBH Indonesia, 1989.
- Bagir Manan. *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2000.
- Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Eri Yulikhsan, *Keputusan Diskresi Dalam Dinamika Pemerintahan (Aplikasi Dalam PTUN)*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016.
- Hassel Nogi S. Tangkilisan, *Manajemen Publik*, Jakarta: PT. Grasindo, 2005.
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Indroharto, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Harapan, 1993.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Irfham Fahmi, *Perilaku Organisasi Teori, Aplikasi, dan Kasus*, Bandung: Alfabeta, 2016.

Jonaedi Efendi, dkk, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Cet.Ke-1, Jakarta: PrenadaMedia Group, 2016.

Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*,Makasar: Pustaka Refleksi, 2010.

Krishna Djaya Darumurti, *Diskresi Kajian Teori Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2016.

Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Permata Aksara, 2016.

Lysa Angrayni, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pekanbaru: Suska Press, 2014,

Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2000.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Syaiful Sagala, *Memahami Organisasi Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi(Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Sulistiyowati Irianto, *Otonomi Perguruan Tinggi Suatu Keniscayaan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.

Taufiqurahman, *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*, Jakarta: Universitas Moestopo Beragama (Pers), 2014.



Yusuf Hadijaya, *Organisasi Kemahasiswaan dan Kompetensi Manajerial Mahasiswa*, Medan: Perdana Publishing, 2015.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

## B. Terbitan Pemerintah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Perguruan Tinggi.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Surat Keputusan Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor 00699/R/2016 Tentang Panduan Dan Informasi Akademik T.A 2016/2017 UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2016.

Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor 1321/R/2019 Tentang Pengembalian Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Periode Tahun 2018-2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Surat Keputusan Rektor UIN Suska Riau Nomor 0004.1/R/2019 Tentang Panitia Pemilihan Senat Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Masa Bakti Tahun 2019.

Surat Keputusan Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor 1074/R/2019 Tentang Pembentukan *Tim Ad Hoc* Serta *Tim Fit and Proper Test* Pemilihan Senat Mahasiswa dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Serta Fakultas di Lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2019.

Pengumuman Nomor 1612/Un.04/WR3.3/PP.03/06/2019 Tentang Seleksi Serentak Calon Ketua SEMA dan DEMA Se-UIN Sultan Syarif Kasim Riau (8 Fakultas dan Universitas) Masa Bakti Tahun 2019-2020.

Pengumuman Nomor 2757/Un.04/WR.3/PP.03/08/2019 Tentang Hasil Pemilihan Ketua Senat Mahasiswa dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas dan Fakultas Se-UIN Sultan Syarif Kasim Riau Masa Bakti Tahun 2019-2020.

Pengumuman Nomor 2758/Un.04/WR.3/PP.03/08/2019 Tentang Seleksi Serentak Calon Ketua Unit Kegiatan Khusus (UKK) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) UIN Sultan Syarif Kasim Riau Masa Bakti Tahun 2019-2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### C. Jurnal dan Skripsi

Amri Islamuddin, *Skripsi: Konsep Diskresi Pejabat Pemerintah (Telaah Ketatanegaraan Islam*, (Makasar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2019), [repository.uin-alaudhin.ac.id/14472/](https://repository.uin-alaudhin.ac.id/14472/).

Kosasih, *Peranan Organisasi Kemahasiswaan Dalam Pengembangan Civic Skills Mahasiswa*. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Vol 25, No 2, 2016, <https://ejournal.upi.edu/index.php/jpis/article/view/6196>.

### D. Surat Kabar Elektronik dan Website

HaluanRiau.co, *Demo di UIN Suska Riau Mahasiswa Bakar Ban dan Tutup Akses Kampus*, <https://riau.haluan.co/2019/06/28/demo-di-uin-suska-riau-mahasiswa-bakar-ban-dan-tutup-akses-kampus/>.

LPM Gagasan UIN Suska Riau, *Aliansi Mahasiswa UIN Suska Riau Melakukan Aksi Dalam Spanduknya Bertuliskan “Kembalikan Demokrasi UIN Suska Riau” “Jangan Anggap Kami Anak Kecil Lagi Ayahanda Dan Juga Bukan Anak Tiri” “Biarkan Kami Memilih Pemimpin Kami Itu Hak Kami”*, 26 Juni 2019. <https://www.instagram.com/p/BzKZSylgA2-/?igshid=1hcmk80564mws>.

RiauPos.Co 2019, *Temui Mahasiswa: Rektor UIN Suska Riau Prof Dr Ahmad Mujahidin Menjumpai Mahasiswa yang menggelar Aksi Demonstrasi Didepan Gedung Rektorat UIN Suska Riau*, <http://m.riaupos.co/202711-berita-akhirnya-rektor-uin-suska-temui-mahasiswa.html>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN Sultan Syarif Kasim Riau, *Sejarah Ringkas Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, <https://uin-suska.ac.id/profil/sejarah-ringkas-universitas/>

UIN Sultan Syarif Kasim Riau, *Tenaga Akademik*, <https://uin-suska.ac.id/akademik/tenaga-akademik/>

Universitas Pendidikan Indonesia, *Museum Pendidikan Nasional: Rektor Dari Masa Ke Masa*, <http://museumpendidikannasional.upi.edu/index.php/rektor-dari-masa-ke-masa>.

Wikipedia, *Rektor*, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Rektor>.



## PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN SKRIPSI

Wawancara ini ditujukan untuk skripsi dengan judul “Pemilihan Ketua Kelembagaan Mahasiswa UIN SUSKA Riau Masa Bakti 2019-2020 Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.” Sehubungan dengan hal tersebut penulis mengharapkan bantuan responden untuk menjawab pertanyaan pedoman wawancara penelitian skripsi dibawah ini untuk tujuan akademis dan segala data yang diisi oleh respon den akan dijaga kerahasiaannya. Atas bantuan dan partisipasinya penulis ucapkan terimakasih.

### Penulis

Nama : M. Ilham Assauri  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Jurusan : Ilmu Hukum

### Identitas Responden

Nomor :  
Tanggal Wawancara :  
Tempat Wawancara :  
Nama Informan :  
Jabatan :  
Unit Kerja :  
Masa Kerja :

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## A. Pedoman Wawancara Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana pendapat bapak tentang organisasi kemahasiswaan khususnya di UIN Suska Riau ?
2. Apakah bapak mengetahui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam ?
3. Bagaimana pendapat bapak tentang Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam diterapkan di UIN Suska Riau ?
4. Apakah alasan bapak mengeluarkan Surat Keputusan Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau tentang pembentukan Tim *Ad Hoc* dan Tim *Fit and Proper Test* sebagai pelaksana pemilihan ketua Senat Mahasiswa dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas serta Fakultas di lingkungan UIN Suska Riau masa bakti tahun 2019-2020?
5. Kenapa dalam pembentukan Tim *Ad Hoc* dan Tim *Fit and Proper Test* bapak tidak melibatkan mahasiswa sebagai pelaksana pemilihan ketua Senat Mahasiswa dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas serta Fakultas di lingkungan UIN Suska Riau masa bakti tahun 2019-2020?
6. Apakah bapak mengetahui Aliansi Mahasiswa UIN Suska Riau ?
7. Bagaimana tanggapan bapak tentang Aliansi Mahasiswa UIN Suska Riau yang melakukan aksi penolakan terhadap pembentukan Tim *Ad Hoc* dan Tim *Fit and Proper Test* sebagai pelaksana pemilihan ketua Senat Mahasiswa dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas serta Fakultas di lingkungan UIN Suska Riau masa bakti tahun 2019-2020 ?
8. Bagaimana tanggapan bapak tentang Aliansi Mahasiswa UIN Suska Riau yang melakukan aksi penolakan terhadap hasil pemilihan ketua Senat Mahasiswa dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas serta Fakultas di



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lingkungan UIN Suska Riau masa bakti tahun 2019-2020 yang telah ditetapkan oleh Tim *Ad Hoc* dan Tim *Fit and Proper Test* ?

9. Apakah masa bakti selanjutnya pemilihan ketua kelembagaan mahasiswa UIN Suska Riau kembali kepada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam ?

**B. Pedoman Wawancara Wakil Rektor III Bagian Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau**

1. Apakah bapak mengetahui organisasi kemahasiswaan ?
2. Bagaimana pendapat bapak tentang organisasi kemahasiswaan khususnya di UIN Suska Riau ?
3. Apakah bapak mengetahui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam ?
4. Bagaimana pendapat bapak tentang Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam diterapkan di UIN Suska Riau ?
5. Apakah bapak mengetahui Tim *Ad Hoc* dan Tim *Fit and Proper Test* yang dibentuk Rektor UIN Suska Riau sebagai pelaksana pemilihan ketua Senat Mahasiswa dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas serta Fakultas di lingkungan UIN Suska Riau di lingkungan UIN Suska Riau masa bakti tahun 2019-2020 ?
6. Bagaimana tanggapan bapak tentang Tim *Ad Hoc* dan Tim *Fit and Proper Test* yang dibentuk Rektor UIN SUSKA Riau sebagai pelaksana pemilihan ketua Senat Mahasiswa dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas serta Fakultas di lingkungan UIN Suska Riau masa bakti tahun 2019-2020 ?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Apakah alasan Tim *Ad Hoc* dan Tim *Fit and Proper Test* menetapkan persyaratan dan mekanisme pemilihan Senat Mahasiswa dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas serta Fakultas di lingkungan UIN Suska Riau masa bakti 2019-2020. Sehingga ada beberapa syarat yang telah ditetapkan didalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dihapuskan ?
8. Apakah bapak mengetahui ada beberapa fakultas yang tidak mengikuti pemilihan ketua Senat Mahasiswa dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas serta Fakultas di lingkungan UIN Suska Riau masa bakti tahun 2019-2020 ?
9. Bagaimana prosedur Tim *Ad Hoc* dan Tim *Fit and Proper Test* dalam menetapkan ketua Senat Mahasiswa dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas serta Fakultas di lingkungan UIN Suska Riau masa bakti tahun 2019-2020 yang tidak mengikuti seleksi serentak ?
10. Apakah bapak mengetahui Aliansi Mahasiswa UIN SUSKA Riau ?
11. Bagaimana tanggapan bapak tentang Aliansi Mahasiswa UIN Suska Riau yang melakukan aksi penolakan terhadap pembentukan Tim *Ad Hoc* dan Tim *Fit and Proper Tests* ebagai pelaksana pemilihan ketua Senat Mahasiswa dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas serta Fakultas di lingkungan UIN Suska Riau masa bakti tahun 2019-2020 ?
12. Bagaimana tanggapan bapak tentang Aliansi Mahasiswa UIN Suska Riau yang melakukan aksi penolakan terhadap hasil pemilihan ketua Senat Mahasiswa dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas serta Fakultas di lingkungan UIN Suska Riau masa bakti tahun 2019-2020 yang telah ditetapkan oleh Tim *Ad Hoc* dan Tim *Fit and Proper Test* ?
13. Apakah masa bakti selanjutnya pemilihan ketua kelembagaan mahasiswa UIN Suska Riau kembali kepada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam ?





### C. Pedoman Wawancara Ketua Senat Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Masa Bakti Tahun 2018-2019

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Apakah anda mengetahui tentang Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam ?
2. Bagaimana pendapat anda tentang Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam ?
3. Apakah faktor penyebab Senat Mahasiswa UIN Suska Riau masa bakti 2018-2019 tidak melaksanakan pemilihan ketua Senat Mahasiswa UIN Suska Riau masa bakti tahun 2019-2020 sebelum masa bakti kepengurusan selesai ?
4. Bagaimana tanggapan anda tentang kepengurusan Senat Mahasiswa UIN Suska Riau masa bakti tahun 2018-2019 tidak melaksanakan pemilihan ketua Senat Mahasiswa UIN Suska Riau masa bakti tahun 2019-2020 sebelum masa bakti kepengurusan selesai ?
5. Apakah anda mengetahui tentang pemilihan ketua Senat Mahasiwa dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas serta Fakultas di lingkungan UIN Suska Riau masa bakti tahun 2019-2020 ?
6. Apakah anda mengetahui salah satu ketua Senat Mahasiwa dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas serta Fakultas di lingkungan UIN Suska Riau masa bakti tahun 2019-2020 ?
7. Apakah anda mengetahui Tim *Ad Hoc* dan Tim *Fit and Proper Test* yang dibentuk oleh Rektor UIN Suska Riau sebagai pelaksana pemilihan ketua Senat Mahasiwa dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas serta Fakultas di lingkungan UIN Suska Riau masa bakti tahun 2019-2020 ?
8. Bagaimana tanggapan anda tentang Tim *Ad Hoc* dan Tim *Fit and Proper Test* yang dibentuk Rektor UIN Suska Riau sebagai pelaksana pemilihan ketua Senat Mahasiwa dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas serta Fakultas di lingkungan UIN Suska Riau masa bakti tahun 2019-2020 ?





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Apakah anda mengetahui Aliansi Mahasiswa UIN Suska Riau yang melakukan aksi penolakan terhadap Tim *Ad Hoc* dan Tim *Fit and Proper Test* sebagai pelaksana pemilihan dan penetapan ketua Senat Mahasiswa dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas serta Fakultas di lingkungan UIN Suska Riau masa bakti tahun 2019-2020 ?
10. Apakah anda tergabung bersama Aliansi Mahasiswa UIN Suska Riau yang melakukan aksi penolakan terhadap Tim *Ad Hoc* dan Tim *Fit and Proper Test* sebagai pelaksana pemilihan dan penetapan ketua Senat Mahasiswa dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas serta Fakultas di lingkungan UIN Suska Riau masa bakti tahun 2019-2020 ?
11. Bagaimana tanggapan anda tentang Aliansi Mahasiswa UIN Suska Riau yang melakukan aksi penolakan terhadap Tim *Ad Hoc* dan Tim *Fit and Proper Test* sebagai pelaksana pemilihan dan penetapan ketua Senat Mahasiswa dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas serta Fakultas di lingkungan UIN Suska Riau masa bakti tahun 2019-2020 ?
12. Bagaimana tanggapan anda dengan sistem pemilihan ketua Senat Mahasiswa dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas serta Fakultas di lingkungan UIN Suska Riau masa bakti tahun 2019-2020 ?
13. Apakah sistem yang anda ingin diterapkan untuk pemilihan ketua Senat Mahasiswa dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas serta Fakultas di lingkungan UIN Suska Riau masa bakti selanjutnya ?

#### **D. Pedoman Wawancara Ketua Senat Mahasiswa Dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Serta Fakultas Di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Masa Bakti Tahun 2018-2019**

1. Apakah anda mengetahui tentang Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam ?



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

2. Bagaimana pendapat anda tentang Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam ?
3. Apakah anda mengetahui tentang pemilihan ketua Senat Mahasiswa dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas serta Fakultas di lingkungan UIN Suska Riau masa bakti tahun 2019-2020 ?
4. Apakah anda mengetahui salah satu ketua Senat Mahasiswa dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas serta Fakultas di lingkungan UIN Suska Riau masa bakti tahun 2019-2020 ?
5. Apakah anda mengetahui Tim *Ad Hoc* dan Tim *Fit and Proper Test* yang dibentuk oleh Rektor UIN Suska Riau sebagai pelaksana pemilihan ketua Senat Mahasiswa dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas serta Fakultas di lingkungan UIN Suska Riau masa bakti tahun 2019-2020 ?
6. Bagaimana tanggapan anda tentang Tim *Ad Hoc* dan Tim *Fit and Proper Test* yang dibentuk Rektor UIN Suska Riau sebagai pelaksana pemilihan Senat Mahasiswa dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas serta Fakultas di lingkungan UIN Suska Riau masa bakti tahun 2019-2020 ?
7. Apakah anda mengetahui Aliansi Mahasiswa UIN Suska Riau yang melakukan aksi penolakan terhadap Tim *Ad Hoc* dan Tim *Fit and Proper Test* sebagai pelaksana pemilihan dan penetapan ketua Senat Mahasiswa dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas serta Fakultas di lingkungan UIN Suska Riau masa bakti tahun 2019-2020 ?
8. Apakah anda tergabung bersama Aliansi Mahasiswa UIN Suska Riau yang melakukan aksi penolakan terhadap Tim *Ad Hoc* dan Tim *Fit and Proper Test* sebagai pelaksana pemilihan dan penetapan ketua Senat Mahasiswa dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas serta Fakultas di lingkungan UIN Suska Riau masa bakti tahun 2019-2020 ?
9. Bagaimana tanggapan anda tentang Aliansi Mahasiswa UIN Suska Riau yang melakukan aksi penolakan terhadap Tim *Ad Hoc* dan Tim *Fit and Proper Test* sebagai pelaksana pemilihan dan penetapan ketua Senat



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mahasiswa dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas serta Fakultas di lingkungan UIN Suska Riau masa bakti tahun 2019-2020 ?

10. Bagaimana tanggapan anda dengan sistem pemilihan ketua Senat Mahasiswa dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas serta Fakultas di lingkungan UIN Suska Riau masa bakti tahun 2019-2020 ?

11. Apakah sistem yang anda ingin diterapkan untuk pemilihan ketua Senat Mahasiswa dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas serta Fakultas di lingkungan UIN Suska Riau masa bakti selanjutnya ?

**E. Pedoman Wawancara Ketua Senat Mahasiswa Dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Serta Fakultas Di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Masa Bakti Tahun 2019-2020**

1. Apakah anda mengetahui tentang Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam ?
2. Bagaimana pendapat anda tentang Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam ?
3. Apakah anda mengetahui tentang pemilihan ketua Senat Mahasiswa dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas serta Fakultas di lingkungan UIN Suska Riau masa bakti tahun 2019-2020 ?
4. Apakah anda mengetahui Tim *Ad Hoc* dan Tim *Fit and Proper Test* yang dibentuk oleh Rektor UIN Suska Riau sebagai pelaksana pemilihan ketua Senat Mahasiswa dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas serta Fakultas di lingkungan UIN Suska Riau masa bakti tahun 2019-2020 ?
5. Bagaimana tanggapan anda tentang Tim *Ad Hoc* dan Tim *Fit and Proper Test* yang dibentuk Rektor UIN Suska Riau sebagai pelaksana pemilihan ketua Senat Mahasiswa dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas serta Fakultas di lingkungan UIN Suska Riau masa bakti tahun 2019-2020 ?





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Apakah anda mengikuti pemilihan ketua Senat Mahasiswa dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas serta Fakultas di lingkungan UIN Suska Riau masa bakti tahun 2019-2020 ?
7. Kenapa anda mengikuti pemilihan ketua Senat Mahasiswa dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas serta Fakultas di lingkungan UIN Suska Riau masa bakti tahun 2019-2020 ?
8. Bagaimana anda bisa terpilih sebagai ketua Senat Mahasiswa dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas serta Fakultas di lingkungan UIN Suska Riau masa bakti tahun 2019-2020 ?
9. Setelah anda terpilih sebagai ketua Senat Mahasiswa dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas serta Fakultas di lingkungan UIN Suska Riau masa bakti tahun 2019-2020, apakah masa bakti selanjutnya UIN Suska Riau akan kembali kepada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam ?
10. Apakah anda mengetahui Aliansi Mahasiswa UIN Suska Riau yang melakukan aksi penolakan terhadap Tim *Ad Hoc* dan Tim *Fit and Proper Test* sebagai pelaksana pemilihan dan penetapan ketua Senat Mahasiswa dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas serta Fakultas di lingkungan UIN Suska Riau masa bakti tahun 2019-2020 ?
11. Apakah anda tergabung bersama Aliansi Mahasiswa UIN Suska Riau yang melakukan aksi penolakan terhadap Tim *Ad Hoc* dan Tim *Fit and Proper Test* sebagai pelaksana pemilihan dan penetapan ketua Senat Mahasiswa dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas serta Fakultas di lingkungan UIN Suska Riau masa bakti tahun 2019-2020 ?
12. Bagaimana tanggapan anda tentang Aliansi Mahasiswa UIN SUSKA Riau yang melakukan aksi penolakan terhadap Tim *Ad Hoc* dan Tim *Fit and Proper Test* sebagai pelaksana pemilihan dan penetapan ketua Senat Mahasiswa dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas serta Fakultas di lingkungan UIN Suska Riau masa bakti tahun 2019-2020 ?





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Bagaimana tanggapan anda dengan sistem pemilihan ketua Senat Mahasiswa dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas serta Fakultas di lingkungan UIN Suska Riau masa bakti tahun 2019-2020 ?
14. Apakah sistem yang anda ingin diterapkan untuk pemilihan ketua Senat Mahasiswa dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas serta Fakultas di lingkungan UIN Suska Riau masa bakti selanjutnya ?



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
كلية الشريعة و القانون  
FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Proposal dengan judul "Pemilihan Ketua Kelembagaan Mahasiswa UIN SUSKA Riau Masa Bakti 2019-2020 Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam", ditulis oleh saudara :

Nama : M. Ilham Assauri  
NIM : 11627103873  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Diseminarkan pada :  
Hari / Tanggal : Selasa / 3 Desember 2019  
Narasumber : Ilham Akbar, SHL., SH., MH.

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 4 Desember 2019

Kepala Bagian Tata Usaha  
Fakultas Syariah dan Hukum

Erni, S.Sos., MM.  
NIP. 19680226 199103 2 002

Narasumber

Ilham Akbar, SHL., SH., MH.  
NIP. 130217040

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



© Himpunan Ilmiah UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون  
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/132/2020

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini  
menerangkan bahwa :

Nama : M. ILHAM ASSAURI  
N I M : 11627103873  
Jurusan : ILMU HUKUM

Telah Lulus :

**UJIAN KOMPREHENSIF**

Yang diselenggarakan pada tanggal : 26 DESEMBER 2019

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 7 Januari 2020

Dekan,



DR. Drs. H. Hajar, M.Ag  
NIP 195807121986031005

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU  
Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



032010

### REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/2020/32  
TENTANG

#### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.047/I/PP.00.9/9705/2019** Tanggal 12 Desember 2019, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama              | : | <b>M. ILHAM ASSAURI</b>   |
| 2. NIM / KTP         | : | 11627103873   |
| 3. Program Studi     | : | ILMU HUKUM  |
| 4. Jenjang           | : | S1  |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>PEMILIHAN KETUA KELEMBAGAAN MAHASISWA UIN SUSKA RIAU MASA BAKTI 2019-2020 BERDASARKAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 4961 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN UMUM ORGANISASI KEMAHASISWAAN PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | UIN SUSKA RIAU  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 3 Januari 2020



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI RIAU**

#### Tembusan :

#### Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
جامعة السلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية رياو  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004  
Telp. 0761-562051 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© HAK CIPTA Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : B-0225/Un.04/WR.I/TL.00/01/2020  
Sifat : Biasa  
Lamp :  
Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 17 Januari 2020

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas  
Kabag  
UIN Suska Riau  
Pekanbaru

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, menindaklanjuti surat nomor: 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/2020/32 tanggal 03 Januari 2020 hal Mohon izin Penelitian dan Pengambilan Data Tugas Akhir/Skripsi, maka kami minta kepada Saudara agar dapat membantu Riset nama tersebut di bawah ini :

Nama : M.Ilham Assauri  
NIM : 11627103873  
Program Studi : Ilmu Hukum

Untuk dapat melaksanakan Penelitian dan Pengambilan data guna mendapatkan Data dan Informasi yang terkait dengan Judul Penelitian "Pemilihan Ketua Kelembagaan Mahasiswa UIN Suska Riau Masa Bakti 2019/2020 Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam " pada unit kerja saudara.

Demikianlah kami sampaikan atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalam  
n. Rektor  
Wakil Rektor Bidang Akademik  
dan Pengembangan Lembaga



Drs.H.Suryan A.Jamrah,MA  
NIP.19591009 198803 1 004

Lampusan:  
Yth.Rektor UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293  
Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052  
www.jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com  
Hp. 081275158167 - 085213573669

## SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **M. Ilham Assauri**  
NIM : **11627103873**  
Program Studi : **Ilmu Hukum**  
Judul : **Diskresi Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim  
Riau Dalam Pemilihan Ketua Kelembagaan Mahasiswa Masa  
Bakti Tahun 2019-2020**

Pembimbing : **Asril, S.HL, MH**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 15 Juni 2020

Δ. Pimpinan Redaksi



**M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL**  
NIP. 19880430 201903 1 010

UIN SUSKA RIAU



## RIWAYAT PENULIS



**M. Ilham Assauri**, lahir di Tembilahan pada tanggal 20 Desember 1996. Penulis lahir dari orangtua Rusli dan Aini sebagai anak ke-dua dari tiga bersaudara. Penulis menempuh pendidikan mulai dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 019 Tembilahan lulus pada tahun 2009, kemudian melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 2 Indragiri Hilir lulus pada tahun 2012, setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Tembilahan Hulu lulus pada tahun 2015. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau) pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan Jurusan Ilmu Hukum dan memilih konsentrasi Hukum Tata Negara, penulis lulus pada tahun 2020.

Selama perkuliahan penulis juga aktif di dunia organisasi dan pergerakan mahasiswa. Didalam dunia organisasi mahasiswa khususnya internal UIN Suska Riau penulis aktif di Forum Kajian Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum (FK-MASSYA), Lembaga Kajian Hukum Indonesia (LKHI) UIN Suska Riau, Senat Mahasiswa (SEMA) Fakultas Syariah dan Hukum Masa Bakti 2018-2019 dan external UIN Suska Riau di Forum Lembaga Dakwah Fakultas Hukum Seluruh Indonesia (FORDAFHI). Sementara di pergerakan mahasiswa penulis juga aktif di Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Komisariat UIN Suska Riau.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT. Dengan ketekutan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha penulis berhasil menyelesaikan pengerjaan skripsi dengan judul “Diskresi Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Dalam Pemilihan Ketua Kelembagaan Mahasiswa Masa Bakti Tahun 2019-2020.” Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.